

DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC ACEH

2020-2024

“Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia
untuk mewujudkan visi misi Kemenkeu serta mendukung visi misi Presiden”





Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Aceh

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	2
1.1. Kondisi Umum.....	2
1.1.1. Capaian Kantor Wilayah DJBC Aceh selama Tahun 2015-2019.....	2
1.1.2. Aspirasi dari <i>Stakeholder</i>	6
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB II KERTAS KERJA.....	10
2.1. Tujuan.....	10
2.2. Program Kerja.....	10
BAB III KELEMBAGAAN.....	38
3.1. Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Aceh.....	38
3.1.1. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kantor Wilayah DJBC Aceh.....	38
3.1.2. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Aceh.....	39
3.1.3. Arah Kebijakan Kelembagaan Kantor Wilayah DJBC Aceh.....	40
3.2. Pengelolaan SDM.....	43
3.2.1 Kondisi SDM Kantor Wilayah DJBC Aceh saat ini.....	43
3.3. Sarana Prasarana.....	44
BAB IV TARGET KINERJA.....	45
BAB V PENUTUP.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini, disajikan kondisi umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh yang merupakan penggambaran atas pencapaian-pencapaian tema dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Aceh periode sebelumnya (2015-2019). Dalam Renstra periode sebelumnya, terdapat tiga tema utama yaitu: tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai, serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Selain capaian-capaian yang diraih Kantor Wilayah DJBC Aceh, disadari bahwa dalam upaya mencapai visi dan misi DJBC yang diturunkan kepada Kantor Wilayah DJBC Aceh, terdapat aspirasi masyarakat yang semakin dinamis. Beberapa aspirasi masyarakat yang merupakan harapan *stakeholders* termasuk pengguna jasa kepada Kantor Wilayah DJBC Aceh akan dijabarkan dalam Dokumen Perencanaan Strategis (DPS) ini. Aspirasi masyarakat tersebut didapatkan dalam serangkaian survei kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam lima tahun terakhir. Salah satu masukan yang penting adalah pelayanan yang masih perlu ditingkatkan dimasa yang akan datang dalam rangka melayani *stakeholders* dan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai *Trade Facilitator, Community Protector, Industrial Assistance dan Revenue Collector*. Dalam BAB I ini selain capaian-capaian kinerja dan aspirasi juga potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh.

1.1. Kondisi Umum

Dalam Renstra Kantor Wilayah DJBC Aceh Tahun 2015-2019, dimana Arah Kebijakan dan Strategi yang merupakan turunan dari DJBC yaitu dengan tema penerimaan, pelayanan kepabeanan dan cukai serta pengawasan kepabeanan dan cukai. Capaian dari ketiga tema tersebut dapat disampaikan sebagai berikut.

1.1.1. Capaian Kantor Wilayah DJBC Aceh selama Tahun 2015-2019

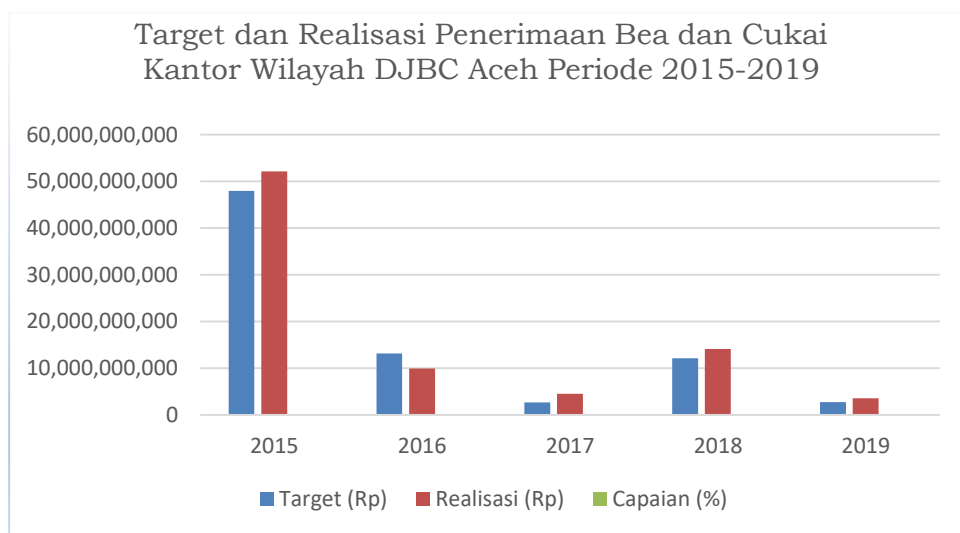
a. Penerimaan Bea dan Cukai

Secara umum selama periode 2015-2019 pencapain target penerimaan bea dan cukai selalu melebihi target APBN-P, hanya di tahun 2015 dan 2016 DJBC tidak berhasil mencapai target APBN-P. Penerimaan bea dan cukai pada periode tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Penerimaan Kantor Wilayah DJBC Aceh selama 2015-2019 selalu melebihi target yang dibebankan hanya pada tahun 2016 target tidak tercapai. Hal ini disebabkan karena volume kegiatan impor yang menurun, penggunaan fasilitas *Free Trade Agreement (FTA)* pada dokumen PIB yang meningkat dan tidak terdapat kegiatan importasi dari proyek pemerintah sebagaimana terjadi pada tahun 2015 seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Badan Urusan Logistik (BULOG). Data capaian penerimaan sebagaimana tercantum dalam table berikut.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Wilayah
DJBC Aceh Periode 2015-2019

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
2015	47.976.156.000	52.119.038.395	108.63
2016	13.142.205.000	9.911.902.000	75.42
2017	2.656.677.000	4.485.393.000	168.83
2018	12.100.086.000	14.077.368.173	116.34
2019	2.694.978.000	3.567.559.500	132.38

Gafik 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Kantor Wilayah
DJBC Aceh Periode 2015-2019



Pencapaian target tersebut berasal dari 5 (lima) KPPBC yang berada di bawah naungan Kantor Wilayah DJBC Aceh yaitu:

1. KPPBC TMP C Sabang
2. KPPBC TMP C Banda Aceh
3. KPPBC TMP C Meulaboh
4. KPPBC TMP C Lhokseumawe
5. KPPBC TMP C Kuala Langsa

Pencapaian target penerimaan selama 2015-2019 dilakukan dengan beberapa upaya antara lain dengan melakukan koordinasi dengan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam rangka memaksimalkan proses pemeriksaan fisik barang sehingga didapatkan informasi yang akurat terkait jenis barang yang pada akhirnya proses penetapan yang dilakukan oleh Seksi Kepabeanan dan Cukai menjadi optimal, termasuk melakukan penetapan kembali (Penelitian Ulang), *Joint Program* dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan juga penggalan potensi penerimaan melalui kegiatan *Project Management* yang dilakukan oleh Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Komponen Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

Pencapaian target penerimaan diawal tahun 2015 hanya berasal dari kegiatan impor yaitu Bea Masuk (BM) saja, namun pada tahun 2017 terdapat momentum dimana kegiatan impor berisiko tinggi sudah tidak ada lagi dan banyak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang menggunakan fasilitas ATIGA sehingga penerimaan dari bea masuk menurun. Penggalan potensi penerimaan selain dari bea masuk berawal dari kegiatan ngobras yang menghasilkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pertama dari KPPBC TMP C Banda Aceh yang merupakan penyumbang penerimaan dari cukai. Kemudian dari kegiatan *project management* dan juga upaya yang dilakukan dengan mengadakan diskusi ekonomi bersama pemerintah daerah di seluruh wilayah Aceh dalam rangka menggali potensi ekspor yang berasal dari wilayah Aceh, sehingga didapatkan *database* sumber daya alam yang bisa menjadi unggulan dari wilayah Aceh untuk dapat di ekspor. Dari kegiatan tersebut didapatkan ekspor perdana *Crude Palm Oil* (CPO) dari KPPBC TMP C Meulaboh yang merupakan potensi penyumbang penerimaan dari Bea Keluar (BK).

Tabel 1.2

Tabel Rincian komponen Penerimaan BM, BK dan Cukai
Tahun 2015-2019

Jenis Penerimaan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Bea Masuk	52.119.038395	9.911.952.000	4.485.393.000	6.350.445.000	3.449.153.000
Bea Keluar	-	-	-	-	-
Cukai	-	20.000.000	-	-	118.792.500
Total	-	52.119.38.395	4.485.393.000	6.350.445.000	3.567.945.500
Pertumbuhan	148,11%	-80.94%	-54.84%	41.58%	-43.82%

Tabel diatas menunjukkan bahwa upaya penggalan potensi penerimaan di luar bea masuk mulai terlihat hasilnya dan bertumbuh dari tahun ke tahun.

b. Pelayanan Kepabeanan dan Cukai

Pelayanan yang diberikan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh termasuk didalamnya adalah pelayanan yang diberikan oleh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh dapat dilihat dari capaian terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait janji layanan.

Tahun 2019 merupakan titik balik dari upaya pemberian fasilitas pada Kantor Wilayah DJBC Aceh. Pada tahun ini pemberian fasilitas kepada pelaku usaha semakin meningkat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pemberian fasilitas pertama pada Kantor Wilayah DJBC Aceh terjadi pada tahun 2016, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat penerbitan izin pemberian fasilitas. Pemberian fasilitas selanjutnya terjadi pada tahun 2019 sehingga terdapat 5 (lima) Pusat Logistik Berikat (PLB), 1 (satu) Kawasan Berikat (KB), 1 (satu) *Free Trade Zone/* Kawasan Bebas dan Pelabuhan Bebas (FTZ/KBPB), dan 1 (satu) Kawasan

Ekonomi Khusus (KEK) pada Kantor Wilayah DJBC Aceh. Adapun rincian data tersebut adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3

Data Penerima Fasilitas pada Kantor Wilayah DJBC Aceh

No.	Jenis Fasilitas	Pelaku Usaha	Unit Kerja yg Mengawasi
1.	PLB	PT Perta Arun Gas	KPPBC TMP C Lhokseumawe
2.	PLB	PT Trans Continent	KPPBC TMP C Banda Aceh
3.	PLB	PT Aceh Makmur Bersama	KPPBC TMP C Lhokseumawe
4.	PDPLB	PT Agritrade Cahaya Makmur	KPPBC TMP C Lhokseumawe
5.	PLB-IKM	CV Tata Niaga Lestari	KPPBC TMP C Banda Aceh
6.	KB	PT Yakin Pasifik Tuna	KPPBC TMP C Banda Aceh
7.	KEK	Arun Lhokseumawe	KPPBC TMP C Lhokseumawe
8.	FTZ/KB	Sabang	KPPBC TMP C Sabang

c. Pengawasan Kepabeanaan dan Cukai

Keberhasilan dalam melakukan kegiatan pengawasan dimulai dari kegiatan penindakan dan ujungnya adalah adanya berkas penyidikan yang disampaikan ke Kejaksaan dengan status P-21, dimana berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan. Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 dibandingkan dengan berkas perkara kasus pidana (SPDP) di bidang kepabeanaan dan cukai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2015, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 4 (empat) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 3 (tiga) berkas.
- b. Pada tahun 2016, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 11 (sebelas) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 11 (sebelas) berkas.
- c. Pada tahun 2017, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 10 (sepuluh) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 9 (sembilan) berkas.
- d. Pada tahun 2018, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 23 (dua puluh tiga) dimana 7 (tujuh) berkas SPDP terbit pada bulan November dan Desember sehingga dihitung untuk capaian tahun 2019 dan 1 (satu) berkas SPDP dikembalikan. Berkas SPDP yang

telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 15 (lima belas) berkas.

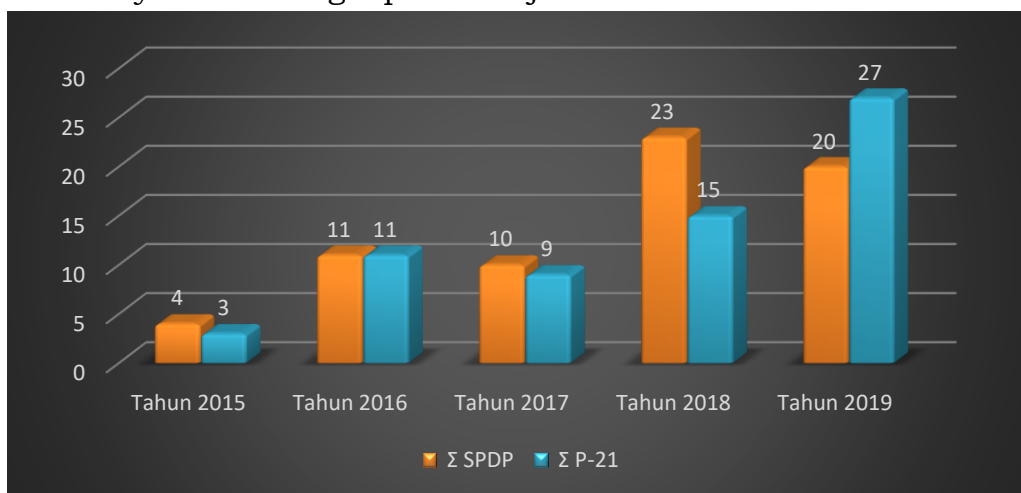
- e. Pada tahun 2019, Berkas SPDP yang terbit sebanyak 20 (dua puluh) dan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) berkas, dimana terdapat 7 (tujuh) berkas yang merupakan berkas SPDP tahun 2018 dan telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) pada tahun 2019.

Capaian ini tidak hanya terkonsentrasi pada Kantor Wilayah DJBC Aceh, sejak tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) dari 5 (lima) KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh telah mampu melaksanakan penyidikan secara mandiri dengan hasil yang membanggakan. Ketiga KPPBC tersebut adalah KPPBC TMP C Kuala Langsa, KPPBC TMP C Meulaboh dan KPPBC TMP C Lhokseumawe. Hal ini menunjukkan semakin baiknya kinerja penyidikan dari aspek kelembagaan dan sumber daya manusia pada KPPBC dimaksud.

Untuk capaian IKU Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan dapat dilihat pada grafik dibawah:

Grafik 1.3

Grafik capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan Yang Dinyatakan Lengkap oleh Kejaksaan Tahun 2015-2019



Selama tahun tahun 2015-2019 Kantor Wilayah DJBC Aceh sudah melakukan penindakan terkait kepabeanan dan cukai baik yang berasal dari kegiatan patroli laut, darat maupun operasi pasar berupa bawang merah, gula, beras, BKC hasil Tembakau dan juga *ballpress*, kapal pengangkut, ayam, kendaraan roda empat dan juga narkoba.

1.1.2. Aspirasi dari Stakeholders

Aspirasi dari *stakeholder* dapat dilihat dari indikator kinerja Survei Kepuasan Pengguna Jasa. Terkait survei kepuasan pengguna jasa, tahun 2015 diperoleh indeks 4.18, tahun 2016 diperoleh indeks 4.37, tahun 2017 diperoleh indeks 4.52, tahun 2018 diperoleh indeks sebesar 4.30, dan di tahun 2019 diperoleh indeks sebesar 4.60 yang termasuk kategori sangat puas. Indeks kepuasan pengguna jasa di Kantor Wilayah DJBC Aceh mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama lima

tahun terakhir. Indeks mengalami peningkatan selama dua tahun berturut-turut dari 4.18 menjadi 4.52 pada tahun 2017 yang merupakan indeks tertinggi selama lima tahun terakhir di Kantor Wilayah DJBC Aceh. Namun pada tahun 2019 indeks sempat mengalami penurunan menjadi 4.30 dikarenakan adanya kekurangcermatan dalam menyampaikan data pengguna jasa yang akan menjadi responden kepada Direktorat Kepatuhan Internal. Salah satunya terdapat pengguna jasa yang sudah tidak aktif dan karena survei dilakukan secara *online* oleh Direktorat Kepatuhan Internal, sehingga tidak dapat dipastikan bahwa yang melakukan pengisian survei adalah pengguna jasa yang memang berinteraksi secara langsung dan mendapatkan pelayanan kepabeanaan dan cukai. Pada tahun 2019, indeks kembali mengalami peningkatan menjadi 4.60 yang merupakan indeks capaian yang pertama di Kantor Wilayah DJBC Aceh. Hal ini Kantor Wilayah DJBC Aceh baru pada tahun 2019 ditunjuk sebagai Satuan kerja peserta survei. Selama ini indeks capaian diperoleh dari gabungan Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh.

Grafik 1.2

Grafik Indeks Capaian Survei Kepuasan Pengguna Jasa Tahun 2015-2019



1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam upaya menjalankan tugas, Kantor Wilayah DJBC Aceh mempunyai potensi yang dapat menjadi unsur pendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan serta pengawasan kepada *stakeholders*. Disisi lain, terdapat juga permasalahan yang harus diantisipasi agar tidak mengganggu upaya Kantor Wilayah DJBC Aceh guna memenuhi target kinerja, melakukan pengawasan, dan memberikan pelayanan terbaik kepada industri dan masyarakat, serta optimalisasi penerimaan. Untuk itu Kantor Wilayah DJBC Aceh dituntut untuk mampu menyesuaikan diri dan senantiasa berinovasi dalam memberikan pelayanan yang optimal. Sehubungan dengan hal tersebut Kantor Wilayah DJBC Aceh, perlu mengidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Potensi tersebut dibagi

menjadi 3 (tiga) tema besar sesuai dengan arah kebijakan/tujuan yang telah ditetapkan oleh DJBC untuk Kantor Wilayah DJBC Aceh, yaitu Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat, Penerimaan dan Birokrasi dan layanan publik.

1. Potensi terkait Perlindungan dan Dukungan Ekonomi Masyarakat adalah secara umum kondisi sumber daya alam di wilayah Aceh sangat banyak dan beragam sehingga akan menjadi potensi yang besar apabila dapat dimanfaatkan dengan baik dalam rangka mendukung tumbuhnya industri dibidang pertanian, perkebunan, pertambangan serta perikanan. Untuk itu Kantor Wilayah DJBC Aceh berupaya untuk menyusun *project management* disetiap KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh untuk melakukan penggalan potensi ekonomi pada masing-masing kota/kabupaten diwilayah pengawasannya dengan tujuan untuk menciptakan “*one district, one product, one industry*”. Selain itu mengupayakan pembentukan Tempat Penimbunan Berikat (TPB) Holtikultura dengan konsep *Creating shared value* (dana desa), pembentukan Tempat Penimbunan Berikat dengan konsep *Cash Waqf Linked Sukuk* (Sukuk Wakaf), Kawasan Berikat (KB) Unit Pengolahan Ikan (UPI). Sedangkan permasalahan yang dihadapi masih sulitnya mendapatkan perijinan dari pemerintah daerah, kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang didominasi oleh generasi milenial sehingga secara pengalaman masih kurang, namun hal ini bisa diatasi dengan memberikan pelatihan. Kemudian jumlah kapal patroli dan juga anggaran untuk mendukung pelaksanaan patroli laut, mengingat luasnya wilayah pengawasan. Belum tersedianya *monitoring control room* untuk melakukan pengawasan di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Aceh, untuk itu Kantor Wilayah DJBC Aceh dalam lima tahun kedepan akan membuat *monitoring control room*.
2. Potensi dari sisi penerimaan untuk Kantor Wilayah DJBC Aceh sebenarnya dengan adanya Sumber Daya Alam yang banyak, sangat mendukung untuk digali dari sisi bea keluar dan cukai, sedangkan untuk bea masuk sangat sulit. Wilayah Aceh merupakan tempat perkebunan kelapa sawit, dimana merupakan salah satu produk yang dikenakan bea keluar sehingga potensi untuk penerimaan dari bea keluar sangat besar. Hal ini sudah terbukti dengan adanya ekspor cangkang dan *Crude Palm Oil* (CPO). Beberapa perusahaan cukai juga sudah mulai bermunculan sehingga akan menjadi potensi penerimaan dari sisi cukai. Sedangkan kendala yang dihadapi karena masih minimnya sarana pendukung transportasi untuk dapat melakukan kegiatan ekspor maupun impor secara langsung dari wilayah Aceh. Hal ini menyebabkan kegiatan importasi juga sedikit sehingga penerimaan dari sisi bea masuk juga kurang, disamping banyaknya penggunaan fasilitas *Free Trade Agreement* (FTA) pada dokumen impor. Dari sisi prosedur untuk ekspor dan impor juga masih harus dilakukan simplikasi supaya dapat mendorong kegiatan ekspor dan impor langsung dari Wilayah Aceh.
3. Terkait Birokrasi dan layanan publik untuk Kantor Wilayah DJBC Aceh potensinya saat ini sangat bagus karena dari pimpinan sangat tinggi komitmennya untuk memajukan wilayah Aceh sehingga ini

akan sangat mendorong dan memotivasi para pegawai yang sebagian besar di dominasi oleh kalangan milenial. Pimpinan yang menjadi *role model* akan sangat berpotensi untuk meningkatkan semangat dari pegawai milenial karena sebenarnya mereka memiliki banyak hal yang bisa dikembangkan dan diarahkan untuk menjalankan program-program yang sudah ditetapkan. Namun selain potensi, pegawai dari kalangan milenial ini mempunyai karakter yang berbeda dengan generasi sebelumnya sehingga terkadang menjadi kendala apabila terjadi kesalahan dalam melakukan komunikasi dengan mereka yang tentunya akan berakibat pada layanan birokrasi kita menjadi terganggu. Dari sisi pengalaman juga menjadi kendala yang bisa berakibat pada pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu dan bisa berakibat pada citra organisasi. Belum tersedianya sistem layanan *supporting unit* kepada pegawai yang terstruktur, cepat dan efisien serta fleksibel terutama dalam mendukung kegiatan pelayanan *Work From Home* yang saat ini dilakukan.

4. Selat Malaka merupakan jalur pelayaran dan perdagangan yang paling padat di kawasan Asia-Pasifik, setiap tahunnya diperkirakan dilintasi kurang lebih 70.000 kapal atau kira-kira 150-200 kapal setiap harinya. Pelabuhan Internasional yang berhadapan langsung dengan Provinsi Aceh adalah Pelabuhan Satun di Thailand dan Pelabuhan Penang di Malaysia. Dengan kondisi tersebut di atas, potensi upaya pelanggaran berupa penyelundupan di bidang kepabeanan dan cukai melalui jalur laut di wilayah perairan Aceh cukup tinggi, dilihat dengan banyaknya tangkapan kapal yang mengangkut barang impor ilegal, seperti bawang, narkoba, *ballpress*, Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), gula, beras ketan, dan lain-lain, dengan tujuan masuk ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Terkait dengan penyelundupan narkoba, Direktur Jenderal Bea dan Cukai dalam salah satu *press release*-nya juga menyatakan adanya perubahan pola penyelundupan narkoba sejak tahun 2015, dimana sebelumnya penyelundupan marak dilakukan melalui udara, kini narkoba masuk ke Indonesia lewat jalur laut: "Sekarang lebih banyak dilakukan di pelabuhan, baik yang utama maupun tradisional". Itulah beberapa potensi dan permasalahan dari Kantor Wilayah DJBC Aceh.

BAB II

KERTAS KERJA

a. Tujuan

Dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, telah ditetapkan 5 (lima) tujuan Kementerian Keuangan dalam rangka mendukung agenda prioritas pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai 4 (empat) tujuan yang terdiri dari 3 (tiga) tujuan turunan (*cascade*) dari tujuan Kementerian Keuangan dan 1 (satu) tujuan non *cascade*, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal dan sektor keuangan yang sehat dan berkelanjutan.
2. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif.
3. Penerimaan negara yang optimal.
4. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai salah satu kantor vertikal hanya mendukung 3 (tiga) dari 4 (empat) tujuan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena adanya *redesign* penganggaran yang baru, yaitu:

1. Perlindungan masyarakat dan dukungan terhadap perekonomian yang efektif dan kontributif.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien.

Tiga tujuan tersebut dijabarkan dalam program kerja dengan beberapa strategi yang mengacu pada strategi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga diharapkan program kerja dan strategi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh akan selaras dengan program kerja dan strategi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Program kerja tersebut juga termasuk program kerja dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh.

b. Program kerja

Beberapa program kerja dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh merupakan program yang mengacu pada peran aktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dengan fokus pada kebijakan berupa:

1. Program untuk mendorong pemulihan ekonomi di daerah akibat pandemi Covid-19; dan
2. Program untuk mendorong peningkatan ekspor di daerah.

Terkait fokus kebijakan dalam program untuk mendorong pemulihan ekonomi akibat Covid-19 dan juga dilatar belakangi oleh data tingkat kemiskinan penduduk di Provinsi Aceh secara nasional menduduki urutan yang cukup tinggi, sedangkan potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa melimpah, maka Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh, membuat beberapa program unggulan berupa program kerja dengan tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif dan termasuk dalam strategi Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah:

- 1) *Project Management* terbentuknya sentra industri.

Program ini dalam rangka mendukung program Direktorat Fasilitas Kepabeanan tentang konsepsi *Project Management* Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor. Kegiatan ini dimulai dengan kegiatan *Road Shows* dalam rangka penggalan potensi perekonomian pada masing-masing Kota dan Kabupaten. Setelah data potensi dari masing-masing Kota dan kabupaten berupa peta komoditas dan daftar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didapatkan, disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh. Dilakukan penelitian terhadap data yang didapatkan untuk selanjutnya dapat ditetapkan obyek *Project Management* calon penerima fasilitas berupa Tempat Penimbunan Berikat (TPB). Selanjutnya dibentuk Tim Pendampingan pelaksanaan *Project Management* TPB dan dilakukan sosialisasi kepada calon penerima fasilitas kepabeanan. Selanjutnya proses pelaksanaan *Project Management* TPB, kemudian dilakukan monitoring evaluasi pelaksanaan baru setelah itu diterbitkan Surat Keputusan sebagai penerima fasilitas kepabeanan dan selanjutnya akan terbentuk sentra industri dengan target “*one district, one product, one industry.*”

- 2) Pendanaan *Creating Shared Value* (CSV) dengan menggunakan *Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS)/sukuk wakaf

CSV merupakan sebuah konsep dalam strategi bisnis yang menekankan pentingnya memasukkan masalah dan kebutuhan sosial dalam perancangan strategi perusahaan. CSV merupakan pengembangan dari konsep tanggung jawab sosial perusahaan. Kerjasama antara perusahaan dengan salah satu program bea cukai terkait pemberdayaan masyarakat melalui program kemitraan CSV. Dana bagi hasil cukai, dana desa, CSR perusahaan dapat dijadikan alternatif pembiayaan melalui skema CSV. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan PER-19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak (hortikultura). Kawasan Berikat PT. *Great Giant Pineapple* (Lampung) merupakan Kawasan Berikat yang bergerak dibidang industri hortikultura. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada petani. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat

Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa *Corporate Guarantee* atau jaminan terus menerus.

CWLS merupakan Program Investasi Jangka Panjang yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber pembiayaan bagi kemajuan perekonomian Aceh. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan PER-19/BC/2018 Pasal 12 yaitu memberikan kemudahan subkontrak. *Awing Group* Japan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan ikan. Pada awal pendirian izinnya, perusahaan sudah mempunyai rencana pasti akan melakukan subkontrak kepada nelayan. Kepala Kantor Wilayah dapat mengatur perlakuan tertentu berupa kemudahan pemberian izin subkontrak oleh Kepala Kantor Pabean pada Lampiran Surat Keputusan Pemberian Izin Kawasan Berikat yang bersangkutan, sehingga izin subkontrak tidak perlu dilakukan setiap kali subkontrak, namun bisa secara periodik dengan jaminan berupa *Corporate Guarantee* atau jaminan terus-menerus. Rencana program CLWS untuk Kawasan Berikat Unit Pengolahan Ikan (UPI).

Program ini bertujuan untuk membantu memberikan pendanaan bagi para nadzir (Petani dan nelayan). Kegiatan ini dimulai dengan mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) bersama dengan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), Perbankan dan calon investor. Kemudian dilakukan *lauching* pelaksanaan *Cash Waqf Linked Sukuk* dan dilanjutkan dengan *open participate* investasi sukuk wakaf. Setelah didapatkan *participan*, dilakukan penyusunan penyaluran kupon kepada para nadzir (Petani dan nelayan) terutama yang terdampak Covid-19, dan terakhir pelaksanaan penyaluran kupon sukuk wakaf. Dengan demikian para petani dan nelayan dapat bekerja lagi sehingga perekonomiannya bisa meningkat.

Terkait fokus kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan ekspor di daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh membuat program kerja dengan tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif dan termasuk dalam strategi Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah berupa:

- 1) Terbentuknya konsolidator barang ekspor (Tempat Penimbunan Sementara atau Pusat Logistik Berikat)

Program ini dilakukan dalam rangka untuk menampung eksportir – eksportir yang tidak dapat melakukan ekspor dalam jumlah banyak, sehingga dapat dilakukan penggabungan dengan barang lain dengan tujuan yang sama untuk menghemat biaya sewa petikemas dan juga biaya pengangkutan sehingga produknya bisa bersaing di dunia internasional. Kegiatan ini dimulai dengan melakukan *road shows* dalam rangka mendapatkan lahan untuk Tempat Penimbunan Sementara atau Pusat Logistik Berikat konsolidator ekspor. Kemudian melakukan asistensi kepada perusahaan untuk ditetapkan sebagai Tempat Penimbunan Sementara atau Pusat Logistik Berikat konsolidator ekspor. Selanjutnya dilakukan

penetapan sebagai Tempat Penimbunan Sementara atau Pusat Logistik Berikat konsolidator ekspor.

2) Program percepatan pelayanan ekspor

Program ini dilatar belakangi belum tersedianya pengangkut yang langsung menuju negara tujuan ekspor dari wilayah Aceh, sehingga kegiatan ekspor masih melalui wilayah Sumatera Utara. Program ini dimulai dengan melakukan koordinasi antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan, dan juga koordinasi unit vertikal dengan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Setelah dilakukan koordinasi akan dibuatkan *Memorandum of Understanding* (MoU) pelayanan ekspor antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean Belawan. Selanjutnya dilakukan asistensi kepada perusahaan dalam pelayanan ekspor. Diharapkan dengan program ini percepatan pelayanan ekspor dari wilayah Aceh dapat segera teratasi dan akan banyak devisa ekspor yang bisa didapatkan oleh wilayah Aceh dan yang paling penting manfaat bagi masyarakat Aceh secara lebih luas.

Selain program-program yang dapat meningkatkan ekonomi secara langsung di atas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh juga turut berusaha mencapai tujuan Perlindungan Masyarakat dan Dukungan terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif dengan sejumlah program yang merupakan strategi peningkatan pengawasan kepabeanan dan cukai di vertikal/daerah. Dengan tingginya potensi pelanggaran kepabeanan dan cukai di Provinsi Aceh, pada periode tahun 2020 s.d. 2024 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh akan melakukan 3 (tiga) strategi besar berupa pengembangan sarana pengawasan patroli laut, penguatan sinergi pengawasan dengan aparat penegak hukum dan instansi lain, serta pembangunan sistem informasi pengawasan.

- 1) Dalam hal pengembangan sarana pengawasan patroli laut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh telah menyusun dan menyampaikan kajian pembangunan Pangkalan Sarana Operasi (PSO) di wilayah Aceh, khususnya di Krueng Geukueh, Aceh Utara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh juga akan menyusun kajian pembangunan pos apung bantu yang bertujuan menjadi pos pengawasan bantu di tengah laut, serta sebagai tempat sandar sementara kapal patroli Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam rangka beristirahat maupun pengisian bahan bakar, ransum, dan air tawar. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh akan membangun pos apung tersebut dengan merenovasi kapal sitaan atas hasil penindakan yang menjadi Barang Milik Negara (BMN). Dengan pembangunan pos apung bantu tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh berharap kegiatan pengawasan dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
- 2) Pada Tahun 2020 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh telah menyusun dan menandatangani MoU bersama Polisi Militer Daerah Militer Iskandar Muda (POMDAM IM). Sebagai implikasinya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan satuan kerja di

bawah telah bekerja sama dengan POMDAM IM dalam kegiatan penindakan dan pengamanan di wilayah masing-masing. Hal tersebut akan direplikasi dengan memperkuat kerja sama dan menyusun MoU dengan instansi-instansi lain, seperti *Aviation Security* (AVSEC) Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM), Kepolisian Daerah (POLDA) Aceh, dan Badan Narkotika Negara Provinsi (BNNP) Aceh. Dengan kerja sama tersebut, diharapkan peningkatan kegiatan pengawasan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan satuan kerja di wilayah masing-masing dapat terjadi, seperti pengawasan penumpang di bandara, pengawasan NPP, dan kegiatan pengawasan lainnya.

- 3) Sejak beberapa tahun terakhir, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh dan satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh telah melakukan peningkatan kegiatan dalam rangka pengawasan. Namun hal tersebut berakibat dengan makin beragam dan kuatnya modus penyelundupan/pelanggaran yang terjadi di lapangan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh akan melakukan penguatan pengawasan dengan pengembangan sistem informasi untuk pengawasan di laut. Seiring dengan pembangunan sistem informasi di Pusat Komando dan Kendali (PUSKODAL) Direktorat Penindakan dan Penyidikan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh juga akan membangun sistem pengawasan laut yang berbasis Informasi dan Teknologi. Sistem informasi pengawasan ini membutuhkan sumber data yang *real time* dan akurat, sehingga diperlukan alat-alat yang dapat menunjang kegiatan pengawasan, seperti *Coastal Surveillance System* (CSS), radar, pencitraan satelit, dan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV). Dalam pengembangannya, data dan informasi yang diperoleh akan menjadi data dan informasi tambahan yang akan diteruskan ke PUSKODAL di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kajian terkait sistem informasi pengawasan ini akan mulai disusun dan disampaikan pada tahun 2021.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sedang berupaya meningkatkan kegiatan ekspor dan impor yang berimplikasi kepada bertambahnya area pengawasan di kawasan dan fasilitas kepabeanan dan cukai. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem informasi yang terintegrasi antara kawasan dan fasilitas kepabeanan dan cukai, satuan kerja yang mengawasi, dan tentunya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh. Dalam rangka optimalisasi pengawasan, diperlukan perangkat Informasi dan Teknologi yang dapat menunjang kebutuhan proses pengintegrasian yang akan diwujudkan dalam bentuk sebuah *Monitoring Control Room* (MCR).

Itulah beberapa program kerja unggulan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh yang akan dilaksanakan pada tahun 2020-2024, sedangkan untuk program kerja-program kerja yang lain secara detil disampaikan dalam kertas kerja sebagai berikut:

**KERTAS KERJA DI LINGKUNGAN KANWIL DJBC ACEH
RENCANA STRATEGIS 2020-2024**

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
1. Perlindungan Masyarakat dan Dukungan Terhadap Perekonomian yang Efektif dan Kontributif									
1.1	Dukungan ekonomi melalui fasilitasi kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1.1.1. Fasilitasi Ekspor dan Fasilitas Kepabeanaan							
		1.1.1.1	Pembentukan Satuan Tugas Ekspor dan Fasilitas Kepabeanaan (Stekfast)	2020	-	-	-	-	Banda
		1.1.1.2	Pendataan potensi-potensi ekspor dan penerima fasilitas kepabeanaan	-	2021	2022	2023	2024	Banda
		1.1.1.3	Kerjasama dengan Pemda,UMKM, FTA <i>Center</i> dan lembaga perdagangan lainnya	-	2021	2022	2023	2024	Banda
		1.1.1.4	Menciptakan Eksportir	-	-	2022	-	2024	Banda
		1.1.1.5	Merekomendasikan penerima Fasilitas Kepabeanaan	-	-	2022	-	2024	Banda
		1.1.1.6	Sosialisasi ketentuan Ekspor dan Fasilitas Kepabeanaan	-	2021	2022	2023	2024	Banda
		1.1.1.7	Memberikan pelayanan aplikasi ceisa Ekpor dan Tempat Penimbunan Berikat	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		1.1.2 Pelaksanaan Project Management Terbentuknya Sentra Industri							
		1.1.2.1	Road Shows dalam rangka penggalan potensi perekonomian pada masing-masing Kota dan Kabupaten	2020	-	-	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.2.2	Penyampaian data potensi perekonomian masing-masing Kota dan Kabupaten ke Kantor Wilayah	2020	2021	-	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.2.3	Penetapan obyek <i>Project Management</i> calon penerima fasilitas kepabeanaan berupa Tempat Penimbunan Berikat (TPB)	2020	2021	-	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.2.4	Pembentukan Tim Pendampingan pelaksanaan <i>Project Management</i> TPB	2020	2021	-	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.2.5	Pelaksanaan sosialisasi kepada calon penerima fasilitas kepabeanaan (TPB)	2020	2021	2022	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.2.6	Proses pelaksanaan <i>Project Management</i> TPB	-	-	2022	2023	2024	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.2.7	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan <i>Project Management</i> TPB	-	-	2022	2023	2024	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.2.8	Proses penerbitan Surat Keputusan Kanwil DJBC kepada pengusaha penerima fasilitas kepabeanaan (TPB)	-	-	2022	2023	2024	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.3 Pembentukan Satgas Fasilitas							
		1.1.3.1	Pemetaan Potensi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.1.3.2	Koordinasi dengan instansi terkait	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.1.3.3	Asistensi potensi ekspor daerah	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.1.3.4	Peningkatan kegiatan ekspor dan	-	-	2022	2023	2024	MBO
		1.1.4 Pendanaan <i>Creating Shared Value</i> dengan menggunakan <i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> (Sukuk Wakaf)							

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.1.4.1	Focus Group Discussion (FGD) "Cash Waqf Linked Sukuk" bersama DJPPR, Perbankan dan Calon Investor	2020	-	-	-	-	FKC Kanwil Aceh
		1.1.4.2	Launching pelaksanaan Cash Waqf Linked Sukuk.	2020	2021	-	-	-	FKC Kanwil Aceh
		1.1.4.3	Open Participate Investasi Sukuk Wakaf	2020	2021	-	-	-	FKC Kanwil Aceh
		1.1.4.4	Penyusunan penyaluran kupon kepada Nadzir (Petani atau Nelayan)	-	2021	2022	-	-	FKC Kanwil Aceh
		1.1.4.5	Pelaksanaan penyaluran kupon Sukuk Wakaf	-	2021	2022	2023	2024	FKC Kanwil Aceh
		1.1.5 Peningkatan kualitas Komunikasi, Publikasi, dan Bimbingan kepada Pengguna Jasa serta Kerja Sama Antar Lembaga							
		1.1.5.1	Melaksanakan Kegiatan Customs Stakeholder Brief	2020	-	2022	-	2024	FKC Kanwil Aceh
		1.1.5.2	Program Siaran "Bincang Bea Cukai" bersama RRI	2020	-	2022	-	2024	FKC Kanwil Aceh
		1.1.5.3	Program Siaran "Suara Publik" bersama TVRI	-	2021	-	2023	-	FKC Kanwil Aceh
		1.1.6 Percepatan Pelayanan Ekspor							
		1.1.6.1	Koordinasi antara Kanwil DJBC Aceh dan KPPBC TMP Belawan	2020	-	-	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.6.2	Koordinasi unit vertikal dengan Kantor Pusat	2020	2021	-	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.6.3	Memorandum of Understanding (MoU) dan SOP pelayanan ekspor Kanwil DJBC Aceh melalui Pelabuhan Belawan	-	2021	2022	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.6.4	Asistensi perusahaan dalam pelayanan ekspor	-	-	2022	2023	2024	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.7 Project Manajemen Fasilitas Kepabeanaan							
		1.1.7.1	Mendata potensi penerima Fasilitas Kepabeanaan	2020	-	-	-	-	Banda
		1.1.7.2	Merekomendasikan calon penerima Fasilitas Kepabeanaan	2020	-	-	-	-	Banda
		1.1.8 Strategi Komunikasi dan Pemanfaatan Media Sosial Skala Nasional dan Internasional							
		1.1.8.1	Melaksanakan Kegiatan Customs Visits Journalist	2020	-	2022	-	2024	FKC Kanwil Aceh
		1.1.8.2	Melaksanakan Kegiatan Customs Facility Expo	-	2021	-	2023	-	FKC Kanwil Aceh
		1.1.8.3	Publikasi dan edukasi terkait Kepabeanaan dan Cukai di media sosial	2020	2021	2022	2023	2024	FKC Kanwil Aceh
		1.1.9 Terbentuknya Konsolidator Barang Ekspor (TPS atau PLB)							
		1.1.9.1	Road Shows dalam rangka tersedianya lahan untuk TPS atau PLB Konsolidator Ekspor	2020	-	-	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.9.2	Asistensi perusahaan untuk ditetapkan sebagai TPS atau PLB Konsolidator Ekspor	-	2021	2022	-	-	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.9.3	Penetapan tempat sebagai TPS atau PLB Konsolidator Ekspor	-	-	-	2023	2024	FKC dan KC Kanwil Aceh
		1.1.10 Upaya peningkatan perekonomian Kawasan Sabang							
		1.1.10.1	Pemetaan dan pencarian potensi IKM berorientasi ekspor	2020	-	-	-	-	SBG
		1.1.10.2	Memberikan asistensi kepada pelaku usaha IKM	2020	-	-	-	-	SBG
		1.1.10.3	Focus Group Discussion (FGD) terkait usaha IKM	2020	-	-	-	-	SBG

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
			1.1.11 Pengaturan mengenai impor sementara kapal Wisata Asing						
		1.1.11.1	Pembuatan kajian atas peraturan terkait	2020	-	-	-	-	SBG
		1.1.11.2	Pengusulan peraturan	-	2021	2022	-	-	SBG
		1.1.11.3	Implementasi peraturan	-	-	-	2023	-	SBG
		1.1.11.4	Monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan	-	-	-	2023	2024	SBG
			1.1.12 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan UMKM						
		1.1.12.1	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pengolahan ikan bandeng	2020	-	-	-	-	LGS
		1.1.12.2	Pelaksanaan kegiatan pemetaan potensi industri di wilayah kerja KPPBC TMP C Kuala Langsa	-	2021	-	-	-	LGS
		1.1.12.3	Pelaksanaan penyusunan program pengolahan potensi industri	-	-	2022	-	-	LGS
		1.1.12.4	Pelaksanaan sosialisasi pengolahan potensi industri kepada masyarakat, fasilitas yang telah disediakan DJBC dan tata cara pelaksanaan ekspor dan impor di bidang Kepabeanan dan Cukai	-	-	-	2023	-	LGS
			1.1.13 Pelaksanaan Publikasi Aturan dan Asistensi terkait Konsolidator Barang Ekspor						
		1.1.13.1	Pelaksanaan publikasi ketentuan terkait ekspor	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		1.1.13.2	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dan pengawasan Barang Ekspor	-	2021	-	-	-	LGS
		1.1.13.3	Pelaksanaan asistensi konsolidator barang ekspor	-	2021	-	-	-	LGS
1.2	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap BKC ilegal		1.2.1 Komunikasi dan koordinasi dengan APH terkait pemberantasan BKC Illegal	2020	2021	2022	2023	2024	LSM MBO
			1.2.2 Komunikasi dan koordinasi dengan Pemda terkait pemberantasan BKC Illegal	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
			1.2.3 Operasi pemberantasan BKC Ilegal secara berkala	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
			1.2.4 Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi teknis terkait	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
			1.2.5 Penguatan Kantor Pelayanan dalam Optimalisasi Peran DBH Terhadap Pemberantasan BKC Ilegal	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		1.2.5.1	Sosialisasi tentang ketentuan Cukai kepada Pemda	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
			1.2.6 Peningkatan edukasi masyarakat tentang BKC	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
			1.2.7 Operasi Bersama Berantas Sindikat Rokok illegal	2020	2021	2022	2023	2024	
1.3	Pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap, penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Prekursor (NPP)		1.3.1 Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika						
		1.3.1.1	Pemetaan terhadap wilayah risiko penyelundupan / peredaran gelap NPP pada masing-masing wilayah kerja DJBC dengan analisa SWOT	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		1.3.1.2	Pelaksanaan Operasi baik dilakukan mandiri maupun berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Kepolisian Daerah/TNI)	2020	2021	2022	2023	2024	LSM LGS

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.3.1.3	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan NPP	2020	2021	2022	2023	2024	LSM LGS
		1.3.2 Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika (Operasi Bersinar)							
		1.3.2.1	Pemetaan terhadap wilayah risiko penyelundupan / peredaran gelap NPP pada wilayah kerja KPPBC TMP C Kuala Langsa	2020	-	-	-	-	LGS SBG
		1.3.2.1	Pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNNK Sabang / Polres Sabang / Lanal Sabang)	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		1.3.2.2	Penguatan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri / TNI)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.3.2.3	Pelaksanaan operasi bersama dengan instansi lain	-	2021	2022	2023	2024	LGS
		1.3.2.4	Peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.3.2.5	Penguatan fungsi intelijen	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.3.2.6	Pelaksanaan operasi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
1.4	Pengawasan perdagangan barang-barang ilegal yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	1.4.1 Operasi Bersama dengan Instansi Teknis Terkait							
		1.4.1.1	Pelaksanaan koordinasi dengan Instansi teknis terkait	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.4.1.2	Pelaksanaan operasi pada titik <i>entry</i> dan/atau gudang	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.4.1.3	Operasi bersama dengan Kantor Bea dan Cukai lain (KPPBC/Kanwil DJBC/Direktorat P2)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.4.1.4	Evaluasi dan tindak lanjut hasil operasi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.4.2 Operasi Bersama dengan instansi terkait							
		1.4.2.1	Penyusunan MoU atau Perpanjangan MoU yang telah ada	-	2021	-	-	-	Banda SBG LGS
		1.4.2.2	Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait	-	2021	-	-	-	Banda SBG LGS
		1.4.2.3	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai di bidang pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan	-	2021	-	-	-	Banda SBG LGS
		1.4.2.4	Pelaksanaan operasi bersama dengan instansi terkait	-	-	2022	-	-	Banda SBG LGS
		1.4.2.5	Evaluasi dan tindak lanjut hasil operasi	-	-	2022	-	-	Banda SBG LGS
		1.4.3 Operasi Bersama dengan Kementerian Teknis Terkait							
		1.4.3.1	Pelaksanaan koordinasi dengan kementerian teknis terkait	-	2021	-	-	-	LSM
		1.4.3.2	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai masing-masing kantor di bidang pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan	-	2021	-	-	-	LSM
		1.4.3.3	Evaluasi dan tindak lanjut hasil operasi	-	-	2022	-	-	LSM
		1.4.4 Penyusunan strategi pengawasan atas komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya							

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC	
				2020	2021	2022	2023	2024		
		1.4.4.1	Penyusunan peta kerawanan wilayah yang berisiko terjadi penyelundupan barang larangan dan pembatasan	2020	2021	2022	2023	2024	LGS SBG Banda MBO	
		1.4.4.2	Penyusunan database pengawasan komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	2020	2021	2022	2023	2024	LGS SBG MBO	
		1.4.5. Workshop Petugas Analyzing Point Larangan dan Pembatasan								
		1.4.5.1	Pengusulan pegawai untuk mengikuti <i>Workshop</i> Petugas <i>Analyzing Point</i> Larangan dan Pembatasan	-	-	2022	-	-	Banda LSM SBG LGS	
		1.4.5.2	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai di bidang pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO LSM	
1.5	Pengembangan <i>Smart Customs and Excise System</i>	1.5.1 Pengembangan Aplikasi Simangat			2020	2021	2022	2023	2024	MBO
1.6	Penguatan kapasitas operasi keamanan laut	1.6.1 Modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli								
		1.6.1.1	Pengajuan pemasangan AIS	-	2021	-	-	-	LGS	
		1.6.1.2	Pengajuan penambahan peralatan <i>Overlay Radar, AIS, Echo Sounder</i> dan <i>GPS Map</i>	-	2021	-	-	-	LGS	
		1.6.1.3	Pengajuan Teropong <i>night vision</i>	-	2021	-	-	-	LGS	
		1.6.2 Modernisasi dan standarisasi peralatan navigasi dan komunikasi kapal patroli kelas VI								
		1.6.2.1	Pemasangan AIS	-	2021	2022	2023	2024	SBG	
		1.6.2.2	Penambahan peralatan <i>Overlay Radar, AIS, Echo Sounder</i> dan <i>GPS Map</i>	-	2021	-	2023	-	SBG	
		1.6.2.3	Penambahan peralatan komunikasi	-	2021	2022	2023	2024	SBG	
		1.6.2.4	Teropong <i>Binocular</i>	-	2021	-	2023	-	SBG	
		1.6.3 Penggunaan Senjata Api dalam kegiatan Pengawasan								
		1.6.3.1	Pengajuan Kartu Kuning Senjata Api Dinas	2020	-	-	-	-	LGS	
		1.6.3.2	Perpanjangan Kartu Kuning Senjata Api Dinas	-	2021	2022	2023	2024	LGS	
		1.6.3.3	Pemeliharaan Senjata Api	2020	2021	2022	2023	2024	LGS	
		1.6.3.4	Latihan Menembak	-	2021	2022	2023	2024	LGS	
		1.6.4 Pengkajian dan Pemanfaatan drone dalam kegiatan Pengawasan								
		1.6.4.1	Pengkajian <i>drone</i> untuk mendukung kegiatan pengawasan	-	2021	-	-	-	LGS SBG	
		1.6.4.2	Perencanaan pengadaan <i>drone</i> untuk mendukung kegiatan pengawasan	-	-	2022	-	-	LGS SBG	
		1.6.4.3	Pengadaan <i>drone</i> untuk mendukung kegiatan pengawasan	-	-	-	2023	2024	LGS SBG	
		1.6.4.4	Pemanfaatan <i>drone</i> untuk mendukung kegiatan pengawasan	-	-	-	-	2024	LGS SBG	
1.7	Peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum	1.7.1 Kegiatan pelayanan dan pengawasan Bandara SIM								
		1.7.1.1	Penyiapan sarana dan prasarana	2020	2021	-	-	-	Banda	
		1.7.1.2	Pelaksanaan Kegiatan <i>Planezoeking</i>	2020	2021	-	-	-	Banda	

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC	
				2020	2021	2022	2023	2024		
		1.7.1.3	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dan pengawasan Bandara SIM	2020	2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.7.2 Kegiatan pelayanan dan pengawasan Barang Kiriman melalui Kantor Pos (e-commerce)								
		1.7.2.1	Mengintegrasikan layanan hanggar dengan kantor pelayanan dan pengawasan	-	-	2022	-	-	SBG	
		1.7.2.2	Penyiapan sarana dan prasarana	2020	2021	-	-	-	Banda SBG	
		1.7.2.3	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dan pengawasan Barang Kiriman melalui Kantor Pos	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG	
		1.7.3 Kegiatan pelayanan dan pengawasan Pelabuhan Balohan								
		1.7.3.1	Rebranding ruang pelayanan dan pengawasan	2020	2021	-	-	-	SBG	
		1.7.3.2	Penyiapan sarana dan prasarana	2020	2021	-	-	-	SBG	
		1.7.3.3	Mengintegrasikan layanan hanggar dengan kantor pelayanan dan pengawasan	-	2021	-	-	-	SBG	
		1.7.3.4	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan dan pengawasan Pelabuhan Balohan	2020	2021	2022	2023	2024	SBG	
		1.7.4 Kegiatan pelayanan manifest								
		1.7.4.1	Monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan manifest	2020	2021	2022	2023	2024	Band SBG	
		1.7.5 Kegiatan pengawasan Pelabuhan Malahayati, Ulee Lheue, dan Lhoknga								
		1.7.5.1	Penyiapan sarana dan prasarana	2020	2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.7.5.2	Monitoring dan evaluasi kegiatan pengawasan Pelabuhan Malahayati, Ulee Lheue, dan Lhoknga	2020	2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.7.5.3	Kegiatan <i>Boatzoeiking</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.7.6 Kegiatan pengawasan peredaran BKC Ilegal								
		1.7.6.1	Pelaksanaan kegiatan Surveillance	2020	2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.7.6.2	Pelaksanaan Operasi BKC Ilegal	2020	2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.7.7 Otomasi Kegiatan Pengawasan (Penyidikan)								
		1.7.7.1	Peraturan dan proses bisnis Penyidikan	-	2021	2022	2023	2024	LGS SBG	
		1.7.7.2	Implementasi Otomasi Kegiatan Pengawasan	-	2021	2022	2023	2024	LGS SBG	
		1.7.7.3	Monitoring dan Evaluasi	-	2021	2022	2023	2024	LGS SBG	
		1.7.8 Pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengawasan Kepabeanan dan Cukai			2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG LGS
		1.7.9 Pengawasan di Bidang Cukai								
		1.7.9.1	Peningkatan Kemampuan Identifikasi Keaslian Pita Cukai (<i>Workshop</i> Identifikasi Keaslian PC)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.9.2	Penguatan <i>database</i> intelijen di bidang Cukai (Simangat)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.9.3	Operasi Pasar BKC Mandiri	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.9.4	Operasi Pasar BKC Bersama Instansi terkait	-	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.10 Pengawasan di Bidang Pabean								
		1.7.10.1	Peningkatan kualitas SDM Pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.10.2	Modernisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC	
				2020	2021	2022	2023	2024		
		1.7.10.3	Penguatan <i>database</i> intelijen di bidang Pabean (Simangat)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.10.4	Pemetaan wilayah kerawanan terjadinya tindak pidana dibidang kepabeanaan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.10.5	Penguatan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri /TNI)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.11 Peningkatan kapasitas SDM di bidang pelayanan kepabeanaan dan cukai								
		1.7.11.1	Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai	2020	2021	2022	2023	2024	SBG	
		1.7.11.2	Sosialisasi atau <i>Workshop</i> terkait pelayanan kepabeanaan dan cukai	2020	2021	2022	2023	2024	SBG	
		1.7.12 Peningkatan kapasitas SDM di bidang penyidikan								
		1.7.12.1	Diklat PPNS	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG	
		1.7.12.2	Pengajuan <i>Workshop</i> penyidikan dan TPPU	-	-	-	2023	-	LGS	
		1.7.12.3	Pengajuan Diklat PPNS	-	-	-	2023	-	LGS	
		1.7.12.4	Pengajuan <i>Workshop</i> administrasi penyidikan	-	-	-	2023	-	LGS	
		1.7.12.5	Pengusulan peserta <i>Workshop</i> dan Diklat penyidikan dan TPPU	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.12.6	Penyegaran dan Internalisasi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.7.12.7	<i>Workshop</i> penyidikan dan TPPU	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG	
		1.7.12.8	<i>Workshop</i> administrasi penyidikan	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG	
		1.7.13 Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan Laut yang unggul								
		1.7.13.1	Pelaksanaan diklat dan kurikulum MCTC kategori keahlian pelaut	-	2021	2022	2023	2024	LGS SBG	
		1.7.13.2	Pelaksanaan diklat dan kurikulum MCTC kategori keterampilan pelaut	-	2021	2022	2023	2024	LGS SBG	
		1.7.13.3	Pelaksanaan diklat dan kurikulum MCTC kategori teknis kepabeanaan dan cukai	2020	2021	2022	2023	2024	SBG	
1.8	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai	1.8.1 Monitoring dan evaluasi			2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		1.8.2 Monitoring dan evaluasi PICE-BT			2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.8.3 Monitoring Harga Transaksi Pasar atas Hasil Tembakau								
		1.8.3.1	Pelaksanaan Monitoring Harga Jual Eceran atas Hasil Tembakau	2020	2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.8.4 Monitoring Kepatuhan Pengusaha Penerima Fasilitas Kepabeanaan								
		1.8.4.1	Pelaksanaan Monitoring kepatuhan pengusaha Tempat Penimbunan Berikat		2021	2022	2023	2024	Banda	
		1.8.5 Pelaksanaan penertiban importir, eksportir dan cukai yang beresiko			2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		1.8.6 Pelaksanaan PICE-BT			2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		1.8.7 Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai			2020	2021	2022	2023	2024	MBO
1.9	Peningkatan kerja sama internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan trans-nasional	1.9.1 Monitoring dan evaluasi kegiatan Passenger Risk Management								
		1.9.1.1	Pengusulan pegawai untuk mengikuti <i>Workshop Managerial</i> dan <i>Training</i> terkait Kejahatan Lintas Negara (TNOC)	2020	2021	2022	2023	2024	SBG	

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.9.1.2	Internalisasi	-	2021	-	-	-	SBG
		1.9.1.3	Operasi Mandiri	-	-	2022	2023	2024	SBG
		1.9.2 Passenger Risk Management							
		1.9.2.1	Pengusulan Peserta <i>Workshop Managerial</i> dan <i>Training</i> terkait Kejahatan Lintas Negara (TNOC)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.9.2.2	Penguatan analisis berupa asistensi dan internalisasi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.9.3 Pencegahan dan Penanganan Barang terkait Terorisme							
		1.9.3.1	Pengusulan pegawai untuk mengikuti <i>Workshop</i> dan <i>Training</i> terkait Kejahatan Lintas Negara (TNOC)	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		1.9.3.2	Operasi Mandiri	-	-	2022	2023	2024	SBG
		1.9.3.3	Koordinasi dengan instansi terkait (BIN, BNNK Sabang, Kesbangpol dan Linmas, Polres Sabang, dan instansi terkait lainnya)	-	2021	2022	2023	-	SBG
		1.9.3.4	Pelaksanaan operasi bersama dengan instansi terkait	2020	2021	2022	2023	2024	SBG MBO
		1.9.3.5	Penguatan Analisis berupa asistensi dan internalisasi	-	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.9.4 Pengawasan Hak Kekayaan Intelektual							
		1.9.4.1	Pengusulan pegawai untuk mengikuti	-	-	-	-	-	SBG
		1.9.4.2	Pelatihan Teknis <i>Transnational Organized Crime</i>	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		1.9.4.3	Lokakarya <i>Transnational Organized Crime</i>	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		1.9.4.4	Penguatan analisis berupa asistensi dan internalisasi	-	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.9.4.5	Pengusulan pegawai untuk mengikuti <i>Workshop</i> Petugas <i>Analyzing Point</i> Larangan dan Pembatasan	-	2021	2022	2023	2024	LGS
		1.9.4.6	Pengusulan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Teknis <i>Transnational Organized Crime</i>	-	2021	2022	2023	2024	LGS
		1.9.5 Pengusulan Pegawai untuk mengikuti Capacity Building - Training of Trainers - Intelligence Workshop - Investigation - Enforcement Workshp							
		1.9.6 Pengusulan Pegawai untuk mengikuti Capacity Building - Training of Trainers - Intelligence Workshop - Passenger Behaviour Workshop - Vessel Search Workshop - Investigation - Enforcement Workshp							
1.10	Peningkatan pengawasan dan kolaborasi dengan <i>other government agencies</i> (OGA) di perbatasan	1.10.1 Peningkatan Kerja Sama dengan Instansi Lain yang terkait dengan proses pergerakan sarana pengangkut dan barang seperti Perhubungan Laut							
		1.10.1.1	Peningkatan koordinasi seperti kegiatan <i>coutersy call</i> dan rapat koordinasi	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
1.11	Peningkatan pengawasan kepabeanaan dan cukai di vertikal/daerah	1.11.1 Monitoring dan evaluasi PICE-BT							
		1.11.2 Operasi Berantas Sindikat / Jaringan Narkotika (Operasi Bersinar)							

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC	
				2020	2021	2022	2023	2024		
		1.11.2.1	Pemetaan terhadap wilayah risiko penyelundupan / peredaran gelap NPP pada wilker KPPBC Meulaboh	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.2.2	Penguatan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri / TNI)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.2.3	Peningkatan kompetensi pegawai dibidang pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.2.4	Penguatan fungsi intelijen	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.2.5	Pelaksanaan operasi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.3 Operasi Bersama dengan Instansi Teknis Terkait								
		1.11.3.1	Penguatan kompetensi dan kemampuan pegawai di bidang pengawasan Barang Larangan dan Pembatasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.3.2	Pelaksanaan operasi pada titik <i>entry</i> dan/atau gudang	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.3.3	Operasi bersama dengan Kantor Bea dan Cukai lain (KPPBC/Kanwil DJBC/Direktorat P2)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.3.4	Evaluasi dan tindak lanjut hasil operasi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO	
		1.11.4 Pelaksanaan Asistensi Pengawasan ke Satker			2020	2021	2022	2023	2024	Kanwil
		1.11.5 Pelaksanaan Kegiatan Penyidikan								
		1.11.5.1	Pemusnahan Barang Hasil Penindakan / Barang Bukti	2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.5.2	Pengamanan Barang Hasil Penindakan / Barang Bukti	2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.5.3	Pengangkutan Barang Hasil Penindakan / Barang Bukti	2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.6 Pelaksanaan Operasi Pasar			2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh
		1.11.7 Pelaksanaan Patroli Laut			2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh
		1.11.8 Pelaksanaan PICE-BT			2020	2021	2022	2023	2024	MBO SBG
		1.11.9 Pelaksanaan Surveillance BKC HT Ilegal			2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh
		1.11.10 Pelaksanaan Surveillance NPP Barang Larangan dan Pembatasan			2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh
		1.11.11 Pelaksanaan Workshop								
		1.11.11.1	<i>Workshop Ship Search</i>	-	2021	-	-	-	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.11.2	<i>Workshop CNT</i>	-	-	2022	-	-	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.11.3	<i>Workshop</i> Administrasi Penyidikan	-	-	-	2023	-	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.12 Pengembangan Sarana Patroli Laut								
		1.11.12.1	Penyampaian Kajian Pembangunan PSO Lhokseumawe	2020	-	-	-	-	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.12.2	Monitoring Tindak Lanjut Implementasi kajian pembangunan PSO Lhokseumawe	-	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.12.3	Penyampaian Kajian Pembangunan POS Apung Bantu		2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.12.4	Monitoring Tindak Lanjut Implementasi kajian Pembangunan Pos Apung Bantu	2020					P2 Kanwil Aceh	
		1.11.13 Pembangunan Sistem Informasi dan Database pengawasan yang terintegrasi								
		1.11.13.1	Konsultasi dan Studi Banding	-	2021	-	-	-	P2 Kanwil Aceh	
		1.11.13.2	Pembangunan <i>Monitoring Control Room</i>	-	2021	2022	-	-	P2 Kanwil Aceh	

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.11.13.3	Pengintegrasian Data dan Informasi (Titik Rawan, CCTV, Data Penindakan, dll) dengan satker	-	2021	2022	2023	-	P2 Kanwil Aceh
		1.11.13.4	Pembangunan Sistem Informasi Pengawasan yang terintegrasi dengan satker dan Dit P2 KPDJBC	-	-	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh
		1.11.14 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana							
		1.11.14.1	Kapal Patroli	2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh
		1.11.14.2	Senjata Api	2020	2021	2022	2023	2024	P2 Kanwil Aceh
		1.11.15 Pencegahan dan Penanganan Barang terkait Terorisme, Hak Kekayaan Intelektual dan Passenger Risk Management							
		1.11.15.1	Pengusulan Peserta <i>Workshop Managerial</i> dan <i>Training</i> terkait Kejahatan Lintas Negara (TNOC)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.16 Pengawasan di Bidang Cukai							
		1.11.16.1	Peningkatan Kemampuan Identifikasi Keaslian Pita Cukai (<i>Workshop</i> Identifikasi Keaslian PC)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.16.2	Penguatan <i>database</i> intelijen di bidang Cukai (<i>Simangat</i>)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.16.3	Operasi Pasar BKC Mandiri secara berkala	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.16.4	Operasi Pasar BKC Bersama Instansi terkait	-	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.17 Pengawasan di Bidang Pabean							
		1.11.17.1	Peningkatan kualitas SDM Pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.17.2	Modernisasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.17.3	Penguatan <i>database</i> intelijen di bidang Pabean (<i>Simangat</i>)	2020	2021	2022	2023	2024	
		1.11.17.4	Pemetaan wilayah kerawanan terjadinya tindak pidana dibidang kepabeanaan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.17.5	Penguatan sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum (BNN / Polri /TNI)	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.18 Pengembangan Digital Forensik dalam kegiatan Penyidikan							
		1.11.18.1	Pengadaan Alat <i>Digital Forensik</i>	-	-	-	2023	2024	MBO
		1.11.18.2	Pelatihan Terkait <i>Digital Forensik</i>	-	-	-	2023	2024	MBO
		1.11.18.3	Implementasi <i>Digital Forensik</i> dalam Kegiatan Penyidikan	-	-	-	2023	2024	MBO
		1.11.18.4	Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	2023	2024	MBO
		1.11.18.5	Pengadaan <i>Direct Finder</i>	-	-	-	2023	2024	MBO
		1.11.18.6	Pengadaan <i>Micro Expression</i> atau <i>detector</i> lain	-	-	-	2023	2024	MBO
		1.11.19 Peningkatan Aplikasi Simangat							
		1.11.20 Peningkatan kapasitas SDM di bidang penyidikan							
		1.11.20.1	Pengusulan peserta <i>Workshop</i> dan Diklat penyidikan dan TPPU	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.20.2	Penyegaran dan Internalisasi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.21 Penyelesaian Piutang Bea dan Cukai							
		1.11.22 Penyusunan strategi pengawasan atas komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya							

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		1.11.22.1	Penyusunan peta kerawanan wilayah yang berisiko terjadi penyelundupan barang larangan dan pembatasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.22.2	Penyusunan <i>database</i> pengawasan komoditi yang dilarang dan/atau dibatasi impor ekspornya	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		1.11.23 Program Sinergi Pengawasan dengan Instansi dan Aparat Penegak Hukum lain							
		1.11.23.1	Penyusunan MOU / PKS dengan POMDAM IM	2020	-	-	-	-	P2 Kanwil Aceh
		1.11.23.2	Penyusunan MOU / PKS dengan AVSEC	-	2021	2022	-	-	P2 Kanwil Aceh
		1.11.23.3	Penyusunan MOU / PKS dengan POLDA	-	2021	2022	-	-	P2 Kanwil Aceh
		1.11.23.4	Penyusunan MOU / PKS dengan BNN	-	-	2022	2023	-	P2 Kanwil Aceh
		1.11.24 Workshop Petugas Analyzing Point Larangan dan Pembatasan							
		1.11.24.1	Pengusulan pegawai untuk mengikuti <i>Workshop</i> Petugas <i>Analyzing Point</i> Larangan dan Pembatasan	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
1.12	Penyempurnaan ketentuan <i>monitoring</i> dan evaluasi terkait pengguna jasa kepabeanaan dan cukai	1.12.1 Monitoring Kepatuhan Pengusaha BKC							
		1.12.1.1	Pelaksanaan Monitoring Kepatuhan Reksan Cukai	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
1.13	Peningkatan kepatuhan pengguna jasa di bidang kepabeanaan dan cukai	1.13.1 Pelaksanaan Survei pengguna jasa							
		1.13.1.1	Kegiatan Pemahaman kepada pengguna jasa terkait pelaksanaan tugas di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
2	Penerimaan Negara yang optimal								
2.1	Intensifikasi dan Ekstentifikasi cukai	2.1.1 Dorongan ke Pemda setempat terkait potensi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau							LSM
		2.1.2 Koordinasi dengan Pemda terkait peluang adanya perusahaan HT dan turunannya							LSM
		2.1.3 Penyusunan Kajian Potensi Cukai							LSM
		2.1.4 Upaya intensifikasi BKC							MBO
		2.1.4.1	Pemetaan Potensi Cukai di Wilayah Kerja			2022	2023	2024	
		2.1.4.2	Assistensi Potensi Cukai			2022	2023	2024	
2.2	Modernisasi sistem administrasi kepabeanaan dan cukai	2.2.1 Digitalisasi Buku Catatan Pabean							MBO
2.3	Pengembangan layanan kepabeanaan & cukai berbasis digital yg berfokus pada <i>user experience</i> & <i>user friendly</i>	2.3.1 Pengembangan Layanan Paperless (E-mail)							MBO
		2.3.2 Pengembangan Sistem Aplikasi Pengelolaan BTD BDN BMN dan TPP							
		2.3.2.1	Sosialisasi Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP	-	2021	-	-	-	SBG
		2.3.2.2	<i>Piloting</i> Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP	-	2021	-	-	-	SBG
		2.3.2.3	<i>Mandatory</i> Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP	-	-	2022	-	-	SBG
		2.3.2.4	Monitoring dan evaluasi Sistem Aplikasi BTD BDN BMN dan TPP	-	-	-	2023	2024	SBG
		2.3.3 Penyempurnaan aplikasi Vessel Declaration							

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2.3.3.1	Usulan Penyempurnaan aplikasi dengan melakukan koordinasi kepada Unit Teknis terkait	2020	-	-	-	-	SBG
		2.3.3.2	Implementasi aplikasi	-	-	-	2023	-	SBG
		2.3.3.3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan aplikasi	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
2.4	Penguatan <i>Joint</i> Program	2.4.1 Joint Analysis							LSM
		2.4.1.1	Pelaksanaan Kegiatan Secondment	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		2.4.2 Joint Investigation		-	-	-	2023	2024	LSM
		2.4.3 Joint Proses Bisnis		2020	-	-	-	-	LSM
		2.4.4 Sinergi bersama dengan APH dan instansi teknis terkait		-	-	-	-	-	MBO
2.5	Penguatan proses bisnis keberatan & peningkatan kemenangan sengketa banding di pengadilan pajak	2.5.1 Koordinasi dengan pihak Direktorat Keberatan dan Banding untuk mendapatkan pendampingan dalam penyelesaian perkara di Pengadilan Pajak		2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		2.5.2 Peningkatan kompetensi penanganan keberatan dan banding (contoh: workshop, FGD)		2020	2021	2022	2023	2024	Banda LGS
2.6	Peningkatan layanan dan optimalisasi penerimaan kepabeanaan di vertikal/daerah	2.6.1 Analisa dan Targetting dalam Pencapaian Penerimaan							
		2.6.1.1	Analisa data dari KPPBC dan pemetaan	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.1.2	Analisa dan Clustering UKM/IKM Aceh (23 kabupaten * 5 produk)	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.1.3	Analisa data kegiatan ekspor, impor, dan cukai di KPPBC	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.1.4	Analisa harga dan nilai pabeaan (survei pasar)	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.2 Edukasi dan komunikasi Tatalaksana Ekspor - Impor							
		2.6.2.1	CVC	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.2.2	Sosialisasi Melalui Media Massa	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.3 Implementasi dalam Pencapaian Target Penerimaan							
		2.6.3.1	Penyusunan Database/Ensiklopedi UKM/IKM Aceh	2020	-	-	-	-	KC Kanwil Aceh
		2.6.3.2	Promosi Produk UKM/IKM melalui Atase BC di LN	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.3.3	Bimbingan teknis terkait EXIMCU kepada pengguna jasa (ekspor, impor dan cukai)		2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.3.4	Membuat WAG atau Telegram Grup untuk Eksportir, Importir, dan pengusaha Cukai	2020	-			-	KC Kanwil Aceh
		2.6.3.5	Membuat WAG atau Telegram grup untuk UKM/IKM Aceh		-	2022	-	-	KC Kanwil Aceh
		2.6.3.6	Database ekspor, impor dan cukai	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.4 Inovasi Layanan Kepabeanaan dan Cukai							
		2.6.4.1	Pembuatan aplikasi penghitungan Bea Masuk dan Pajak Penumpang Internasional (SIMAPIN)	2020	-	-	-	-	Banda
		2.6.4.2	Penunjukan Duta Pelayanan pada Bandara Internasional	2020	-	-	-	-	Banda
		2.6.4.3	Sosialisasi Aturan <i>Manifest</i> dan Tata Cara Pengisian di Aplikasi Modul <i>Manifest</i>	2020	-	-	-	-	Banda
		2.6.4.4	Sosialisasi Ketentuan Kewajiban Kantor Pos Lalu Bea Terhadap Piutang SPPBMCP atau barang Kiriman yang terbit	2020	-	-	-	-	Banda

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2.6.4.5	Sosialisasi Biaya Pengganti Pita Cukai	2020	-	-	-	-	Banda
		2.6.4.6	Membuat inovasi layanan	2020	-	2022	-	2024	Banda
		2.6.5 Internalisasi dan Penguatan Prosedur serta Penggunaan Sistem Teknologi Informasi							
		2.6.5.1	Internalisasi Potensi Penerimaan	2020	-	-	-	-	KC Kanwil Aceh
		2.6.5.2	Penguatan internal terkait Percepatan Ekspor & Impor	2020	-	-	-	-	KC Kanwil Aceh
		2.6.5.3	E-Book Komunikasi Layanan (ACEC)	2020	2021				KC Kanwil Aceh
		2.6.5.4	E-Book Infografis Security Awareness	2020	-	-	-	-	KC Kanwil Aceh
		2.6.5.5	Internalisasi Security Awareness	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.5.6	Penguatan internal terkait aplikasi dan modul aplikasi CEISA terbaru	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.6 Menyajikan data Kepabeanaan dan Cukai							
		2.6.6.1	Merekapitulasi data ekspor 15 harian dan 30 harian yang bersumber dari CEISA Ekspor	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.6.2	Merekapitulasi data Impor 15 harian dan 30 harian yang bersumber dari CEISA Impor	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.6.3	Menatausahakan dokumen terkait data ekspor, impor, cukai dan penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7 Monitoring, Evaluasi dan Ekstensifikasi Program Kerja yang telah dilaksanakan							
		2.6.7.1	Penyusunan Laporan Hasil Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7.2	Monitoring dan Evaluasi Bimtek EXIMCU	-	-	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7.3	Updating Database / Ensiklopedi UKM/IKM Aceh	-	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7.4	Updating database ekspor, impor dan cukai	-	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7.5	Ekstensifikasi/ Penjaringan pengguna jasa/investor baru	-	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7.6	Konsultasi terkait kegiatan monitoring evaluasi keberatan dan banding di Lingkungan Kanwil DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7.7	Implementasi audit dan notul	-	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.7.8	Implementasi Joint Program	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.8 Pemantauan Realisasi Piutang Bea dan Cukai							
		2.6.8.1	Merekapitulasi data piutang pada kertas kerja berdasarkan dokumen yang diperoleh dari satker	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.8.2	Melakukan validasi data piutang kertas kerja satker terhadap data pada CEISA billing	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.8.3	Menatausahakan dokumen terkait data piutang berdasarkan laporan bulanan LP1 dan LP2 sesuai dengan PER-23/BC/2018 Tentang Pedoman Penatausahaan Piutang di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Sistem Aplikasi Piutang dan Pengembalian (SAPP)	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.9 Pembentukan Satgas Fasilitas							

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2.6.9.1	Pemetaan Potensi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.9.2	Koordinasi dengan instansi terkait	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.9.3	Asistensi potensi ekspor daerah	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.9.4	Peningkatan kegiatan ekspor dan impor	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.10 Pemetaan ke KPPBC terkait Potensi Penerimaan							
		2.6.10.1	Melakukan inventarisasi data terkait produk unggulan di bidang impor, ekspor dan cukai di lingkungan KPPBC	2020	-	-	-	-	KC Kanwil Aceh
		2.6.10.2	Observasi lapangan	2020	-	-	-	-	KC Kanwil Aceh
		2.6.11 Penggalan potensi ekspor, impor dan pelayaran di masing-masing KPPBC							
		2.6.11.1	Melakukan inventarisasi data terkait potensi ekspor, impor, dan cukai di lingkungan KPPBC	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.11.2	Mengumpulkan informasi terkait perusahaan/UMKM yang potensial mendukung kegiatan ekspor, impor dan cukai	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.11.3	Mengumpulkan informasi terkait layanan dan biaya jasa transportasi, perusahaan peti kemas, dan perusahaan pergudangan yang dinilai potensial mendukung kegiatan ekspor impor	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.11.4	Observasi Lapangan terkait kelayakan Sarana dan prasarana Pelabuhan	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.11.5	Koordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang berpotensi menyumbang penerimaan	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.11.6	Penjaringan Investor baru melalui jalur formal/informal	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.12 Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika dan sadar hukum							
		2.6.12.1	Peningkatan pemahaman pentingnya ketaatan kepada hukum dan/atau etika ASN	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.12.2	Pemberian pendampingan kepada pegawai yang mengalami masalah hukum	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.12.3	Peningkatan kerjasama dengan praktisi dan/atau akademisi di bidang hukum	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.12.4	Peningkatan kompetensi penanganan perkara hukum	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.13 Peningkatan kualitas SDM							
		2.6.13.1	Pengusulan Diklat dan <i>Workshop</i>	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.13.2	Pengembangan kompetensi SDM secara mandiri	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.13.3	<i>In House Training</i> dengan Praktisi/Narasumber yang kompeten	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.14 Percepatan pelayanan ekspor							
		2.6.14.1	Evaluasi SOP pelayanan Ekspor	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.14.2	Perbaikan SOP Pelayanan Ekspor	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.14.3	Pengusulan Perbaikan SOP Pelayanan Ekspor	2020	2021	2022	2023	2024	MBO

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		2.6.14.4	Pelayanan Bongkar Muat di luar hari kerja	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.15 Sistem Teknologi & Informasi yang kredibel dalam menunjang percepatan proses bisnis di Bidang Kepabeanaan dan Cukai							
		2.6.15.1	Melakukan pengecekan kelayakan dan keamanan <i>tools</i> IT untuk menunjang pengoperasian aplikasi CEISA dan lainnya	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.15.2	<i>Updating tools</i> IT untuk menunjang aplikasi CEISA dan lainnya	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.15.3	Merekapitulasi data laporan performa CEISA	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.15.4	Menatausahakan data terkait monitoring aplikasi TI	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.15.5	Menatausahakan dokumen terkait data performa CEISA	2020	2021	2022	2023	2024	KC Kanwil Aceh
		2.6.16 Upaya intensifikasi BKC							
		2.6.16.1	Pemetaan Potensi Cukai di Wilayah Kerja	-	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.6.16.2	Asistensi potensi cukai	-	2021	2022	2023	2024	MBO
2.7	Perluasan basis penerimaan kepabeanaan dan cukai	2.7.1 Fasilitasi informasi dan dukungan terhadap UMKM orientasi ekspor							
		2.7.1.1	Implementasi pengembangan	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		2.7.2 Koordinasi eksternal dengan Pemda dan instansi terkait untuk peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan Ekspor melalui pelabuhan Krueng Geukueh							
		2.7.3 Pembentukan Satgas Fasilitas							
		2.7.3.1	Pemetaan Potensi Daerah	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.7.3.2	Koordinasi dengan instansi terkait	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.7.3.3	Asistensi potensi ekspor daerah	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		2.7.3.4	Peningkatan kegiatan ekspor dan impor	-	-	2022	2023	2024	MBO
		2.7.4 Pemetaan basis penerimaan							
		2.7.4.1	Pemetaan basis penerimaan	-	2021	2022	2023	2024	LSM
2.8	Penguatan kerjasama dengan Kementerian & Lembaga, serta APH dalam rangka pengamanan penerimaan negara	2.8.1 Sinergi bersama dengan TNI dan /atau Polri (Operasi Gabungan)							
				-	2021	2022	2023	2024	LGS SBG
3. Birokrasi dan Pelayanan Publik yang agile, efektif dan efisien									
3.1	Pembentukan sistem kerja dan pemenuhan sarana prasarana new normal pasca Covid-19 di lingkungan DJBC	3.1.1 Implementasi <i>co-working space</i>							LSM
		3.1.2 Melaksanakan prinsip dan pola dasar sistem kerja <i>new normal</i>							MBO
		3.1.3 Pelaksanaan sistem kerja <i>new normal</i>							LSM
		3.1.4 Pemenuhan sarana prasarana sistem kerja <i>new normal</i>							Banda MBO LSM SBG
		3.1.5 Penyusunan prinsip dan pola dasar sistem kerja <i>new normal</i>							Banda SBG
		3.1.6 Penyusunan sistem kerja <i>new normal</i>							Umum Kanwil Aceh SBG LSM
3.2	Pengelolaan administrasi umum dan BMN yang optimal	3.2.1 Mengusulkan pemindahtanganan dan penghapusan BMN							
		3.2.1.1	Melakukan penghapusan BMN berupa Kendaraan Dinas	-	2021	-	-	-	LGS
		3.2.2 Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan BMN							

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.2.2.1	Penyusunan pedoman terkait pedoman skala prioritas pemenuhan BMN	-	2021	-	-	-	Umum Kanwil Aceh
		3.2.2.2	Monitoring dan evaluasi Penggunaan AADB Operasional Jabatan dan AADB Operasional	-	2021	-	-	-	Umum Kanwil Aceh Banda SBG
		3.2.2.3	Monitoring, dan evaluasi pengadaan barang/jasa di Satuan Kerja	2020	2021	2022	-	-	Banda LSM SBG
		3.2.2.4	Perbaikan Rumah Dinas	-	-	2022	2023	2024	MBO
		3.2.2.5	Pemenuhan Sarana Prasarana Pengawasan	-	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.2.2.6	Perbaikan Gedung Kantor	-	-	2022	2023	2024	MBO
		3.2.2.7	Pemenuhan kebutuhan kendaraan dinas	-	-	2022	2023	2024	MBO
		3.2.3 Pengamanan BMN Strategis							
		3.2.3.1	Penyampaian Rencana Asuransi BMN	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda LSM SBG MBO LGS
		3.2.3.2	Monev data penghunian Rumah Negara	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda LSM SBG SBG
		3.2.3.3	Pendataan dan monitoring BMN <i>idle</i> pada Kanwil dan Satker	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda, LSM
		3.2.3.4	Penyusunan data base sertifikat BMN berupa tanah di Satker	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG
		3.2.3.5	Monev data BMN	-	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.2.3.6	Penghapusan BMN rusak berat	-	2021	-	2023	-	MBO
		3.2.4 Pengusulan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara							
		3.2.4.1	Monitoring Aset Belum PSP	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.2.4.2	Pengusulan PSP atas BMN baru	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.2.5 Penyediaan Data BMN yang Akurat dan							
		3.2.5.1	Updating Data BMN Strategis	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda LSM LGS SBG
		3.2.5.2	Penyusunan Laporan BMN	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda LSM SBG MBO LGS
		3.2.5.3	Updating Data BMN	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.2.6 Perencanaan Kebutuhan BMN yang Terarah dan Optimal							
		3.2.6.1	Penyusunan RKBMN	-	-	-	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda LSM SBG MBO LGS
		3.2.6.2	Penyusunan RP4	-	-	-	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda LSM SBG MBO LGS
		3.2.6.3	Penyusunan Pedoman Penyusunan RKBMN	2020	-	-	-	-	Banda SBG LGS
		3.2.6.4	Penyusunan Standar Kebutuhan AADB Operasional Khusus	2020	-	-	-	-	Banda LSM SBG LGS
		3.2.6.5	Penyusunan Standar Luas Tanah Gedung dan Bangunan Kantor	2020	-	-	-	-	Banda SBG
		3.2.6.6	Penyajian data Luas Tanah Gedung dan Bangunan Kantor	2020	-	-	-	-	LSM
3.3	Pengelolaan keuangan yang berkualitas dan selaras dengan redesain penganggaran	3.3.1 Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian							
		3.3.1.1	Asistensi dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.1.2	Verifikasi dan penelaahan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.1.3	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Keuangan	-	2021	-	2023	-	Umum Kanwil Aceh

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.3.1.4	Monitoring, validasi transaksi aset dan keuangan, dan pengendalian internal pengelolaan keuangan	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh Banda LSM SBG
		3.3.1.5	Mengusulkan Bimbingan Teknis Akuntansi	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG
		3.3.1.6	peningkatan pengetahuan/kemampuan Teknis Akuntansi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.3.1.7	penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.3.1.8	penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAPPA-W	2020	2021	2022	2023	2024	MBO Banda
		3.3.1.9	Mengikuti asistensi dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKPA	2020	2021	2022	2023	2024	LSM SBG Banda
		3.3.1.10	Verifikasi dan penelaahan Laporan Keuangan tingkat UAKPA	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.3.1.11	Mengikuti bimbingan Teknis Akuntansi	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.3.2 Monitoring dan Evaluasi Belanja							
		3.3.2.1	Melakukan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi belanja dilingkungan Kanwil DJBC Aceh	-	2021	-	2023	2024	Umum Kanwil Aceh SBG
		3.3.2.2	Melakukan asistensi dan pendampingan dalam mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.2.3	Melakukan mitigasi resiko dan pemantauan terhadap belanja modal.	-	2021	2022	-	2024	Umum Kanwil Aceh Banda MBO LSM SBG
		3.3.2.4	Melakukan koordinasi terkait SPD di Kanwil DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.2.5	Mengusulkan untuk mengikuti Bimbingan teknis fungsional pengelola APBN	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.3.2.6	Pengujian secara formal terhadap tagihan yang diajukan PPK	2020	2021	2022	2023	2024	Banda MBO LSM SBG
		3.3.2.7	Melakukan koordinasi dan pusat informasi terkait SPD KP DJBC	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG
		3.3.2.8	Evaluasi rutin pelaksanaan anggaran	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.3.2.9	Mengikuti bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi belanja satker DJBC	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.3.2.10	Mengikuti asistensi dan pendampingan dalam mencapai target kualitas pelaksanaan anggaran yang optimal	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.3.2.11	Mengikuti bimbingan teknis kepada fungsional pengelola APBN	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.3.3 Rencana Umum Pengadaan (RUP)							
		3.3.3.1	Menyampaikan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Satuan Kerja di Lingkungan DJBC	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.3.4 Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran							
		3.3.4.1	Penyusunan Perencanaan Kegiatan dan Anggaran	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.4.2	Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.4.3	Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.4.4	Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.3.4.5	Melakukan Revisi DIPA tahun berjalan	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.4.6	Melakukan Revisi POK tahun berjalan	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.3.4.7	Penyusunan RKAKL Satker	2020	2021	2022	2023	2024	MBO LSM SBG Banda SBG
		3.3.4.8	Penyesuaian Standar Struktur Biaya TA	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.3.4.9	Redesign Sistem Penganggaran	2020	-	-	-	-	LSM
3.4	Pengembangan organisasi yg modern, dinamis, & lincah serta debirokratisasi/ delayering kelembagaan organisasi	3.4.1 Lomba Kantor Wilayah/Pelayanan Terbaik (KWT/KPT) di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh							
		3.4.1.1	Melakukan pengusulan Kantor dalam lomba KWT/KPT di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	-	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.4.1.2	Monitoring dan evaluasi KWT pada Kantor Wilayah DJBC Aceh	-	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.4.2 Pembangunan Kantor Modern							
		3.4.2.1	Kantor berpredikat WBK	2020	-	-	-	-	MBO
		3.4.2.2	Kantor berpredikat WBBM	-	-	2022	-	-	MBO
		3.4.2.3	Penerapan ISO	-	2021	-	-	-	MBO
		3.4.3 Pembangunan lingkungan WBK di KPPBC TMP C Kuala Langsa							
		3.4.3.1	Monitoring dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	-	2021	-	-	-	LGS
		3.4.4 Pembangunan lingkungan WBK-WBBM di KPPBC TMP C Sabang							
		3.4.4.1	Monitoring dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		3.4.4.2	Koordinasi pembangunan, koordinasi, komunikasi, dan asistensi dalam rangka menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	2020	2021	-	-	-	SBG
		3.4.4.3	Pengusulan menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	-	2021	2022	2023	2024	SBG
		3.4.5 Pembangunan ZI/WBK-WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh							
		3.4.5.1	Melakukan pengusulan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.4.5.2	Melakukan penilaian ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.4.5.3	Monitoring dan evaluasi dalam rangka ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.4.5.4	Koordinasi pembangunan, komunikasi, dan asistensi dalam rangka ZI-WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.4.6 Pembangunan Zona Integritas menuju WBK-WBBM di KPPBC TMP C Banda Aceh							
		3.4.6.1	Penilaian Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	2020	-	-	-	-	Banda

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.4.6.2	Monitoring dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.4.6.3	Pengusulan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	-	-	2022	2023	2024	Banda
		3.4.7 Penataan Struktur, Tugas dan Fungsi DJBC							
		3.4.7.1	Akurasi data analisis beban kerja	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.4.7.2	Janji layanan publik	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
3.5	Pengendalian dan pengawasan internal	3.5.1 Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal							
		3.5.1.1	Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal	2020	2021	2022	2023	2024	MBO LSM
		3.5.1.2	Penerapan Pengendalian Intern	2020	2021	2022	2023	2024	MBO LSM
		3.5.1.3	Penerapan budaya kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	MBO LSM
		3.5.2 Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal							
		3.5.2.1	Evaluasi Sistem Pengaduan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.2.2	Evaluasi Penerapan benturan kepentingan	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.2.3	Evaluasi <i>Whistle Blowing System</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.2.4	Evaluasi Teknologi Informasi pada unit Kepatuhan Internal	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.2.5	Evaluasi dan reuiu SOP	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.2.6	Evaluasi Pengelolaan Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Banda LSM
		3.5.2.7	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern DJBC	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.5.2.8	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan <i>Fraud Risk Scenario</i>	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.5.2.9	Evaluasi Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.5.2.10	Evaluasi Pelaksanaan Investigasi Internal	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.5.2.11	Pengelolaan Survei Organisasi	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.5.3 Implementasi Sistem dan Infrastruktur Kepatuhan Internal							
		3.5.3.1	Implementasi Menu Kontrak Kinerja pada CEHRIS dan Aplikasi e- <i>Performance</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.4 Pemantauan di Bidang Kepatuhan Internal							
		3.5.4.1	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern DJBC	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.5.4.2	Pelaksanaan Pemantauan <i>Fraud Risk Scenario</i>	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.5.4.3	Pelaksanaan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.5.4.4	Evaluasi Pengelolaan Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.5.5 Penegakan Kepatuhan Internal							
		3.5.5.1	Pemetaan Titik Rawan Proses Bisnis DJBC	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG Banda MBO LSM
		3.5.5.2	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.5.5.3	Melakukan Sidak Gabungan dengan KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	-	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.5.5.4	Melakukan pendampingan pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	-	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.5.5.5	Pemantauan Pengendalian Intern	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG Banda MBO LSM
		3.5.5.6	Pemantauan Penerapan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG Banda MBO LSM
		3.5.5.7	Pembinaan Mental Pegawai	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG Banda MBO LSM
		3.5.5.8	Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG Banda MBO LSM
		3.5.5.9	Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG Banda MBO LSM
		3.5.5.10	Investigasi Internal	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG Banda MBO LSM
		3.5.5.11	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai elalui kegiatan Rapat Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi UKI	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh Banda
		3.5.5.12	Implementasi Menu Kontrak Kinerja pada CEHRIS dan Aplikasi e- <i>Performance</i>	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh SBG
		3.5.5.13	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh Banda MBO LSM SBG
		3.5.5.14	Evaluasi Pengelolaan Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		3.5.5.15	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai	2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		3.5.5.16	Penyelenggaraan kegiatan <i>Spot Check</i> (pemeriksaan mendadak)	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.5.17	Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Kinerja Pegawai di Lingkungan KPPBC TMP C Banda Aceh Rapat Dialog Kinerja Organisasi dan Rapat Koordinasi UKI	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.5.18	Pengelolaan Kinerja di Lingkungan KPPBC TMP C Banda Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.5.19	Melakukan pendampingan pelaksanaan tugas di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.5.20	Tindak Lanjut Penyelesaian Temuan APF	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.5.6 Sinergi dalam rangka pembangunan Integritas							
		3.5.6.1	Berkoordinasi dengan APH/Instansi lain	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.5.6.2	Membuat MoU dengan APH/Instansi lain	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.5.6.3	Melakukan Kerjasama dalam peningkatan integritas	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
3.6	Penguatan budaya dan pembentukan SDM yang berintegritas, unggul, kompeten, berkinerja tinggi, beretika, & sadar	3.6.1 Edukasi dan Bimbingan Teknis di Bidang Kepatuhan Internal							
		3.6.1.1	Implementasi Menu Kontrak Kinerja pada CEHRIS dan Aplikasi e- <i>Performance</i>	2020	-	-	-	-	KI Kanwil Aceh

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
	hukum	3.6.1.2	Peningkatan kompetensi pegawai Unit Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.6.1.3	Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.6.1.4	Penerapan Budaya Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	-	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.6.2 Evaluasi di Bidang Kepatuhan Internal							
		3.6.2.1	Evaluasi Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.6.2.2	Evaluasi hasil Survey di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	KI Kanwil Aceh
		3.6.3 Monitoring dan evaluasi dalam rangka penyempurnaan terkait penempatan talent							
		3.6.3.1	Penyiapan bahan Monev	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.3.2	Penyusunan konsep tools Monev	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.3.3	Pelaksanaan Monev	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.3.4	Laporan Monev	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.4 Monitoring dan evaluasi pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai							
		3.6.4.1	Reviu usulan permintaan penghargaan tahun sebelumnya	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh SBG Banda LGS
		3.6.4.2	Asistensi terkait Penghargaan dan Peraturan Kepegawaian lainnya dalam skema zonasi wilayah	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.4.3	Implementasi pemberian penghargaan	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh SBG Banda LSM LGS
		3.6.4.4	Monitoring hasil penerima penghargaan	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh SBG Banda LSM LGS
		3.6.5 Optimalisasi dan Penguatan Jabatan Fungsional							
		3.6.5.1	Implementasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai	2020	2021	2022	2023	2024	Banda LGS SBG
		3.6.5.2	Monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai	2020	2021	2022	2023	2024	Banda LGS SBG
		3.6.5.3	Pembinaan jabatan fungsional	2020	2021	-	-	-	Banda SBG
		3.6.6 Pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi bagi pegawai							
		3.6.7 Pemenuhan Standar Kompetensi Jabatan							
		3.6.7.1	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan Pembelajaran	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh SBG Banda
		3.6.7.2	Pemenuhan Analisis Kebutuhan Pembelajaran	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh SBG Banda LGS
		3.6.7.3	Pelaksanaan <i>Assessment Center</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.7.4	Pelaksanaan <i>Assessment</i> Teknis	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.7.5	Pelaksanaan PKP	2020	2021	2022	2023	2024	SBG Banda
		3.6.7.6	Pengusulan Analisis Kebutuhan Pembelajaran	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.6.7.7	Pelaksanaan PPKP	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.6.8 Penempatan talent pada jabatan target							
		3.6.8.1	Identifikasi Calon <i>Talent</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.8.2	Seleksi rekam jejak, integritas dan administrasi	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC
				2020	2021	2022	2023	2024	
		3.6.8.3	Konfirmasi Calon <i>Talent</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.8.4	Forum pimpinan	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.8.5	Penetapan <i>Talent</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.8.6	Penempatan <i>Talent</i> pada jabatan target	2020	2021	2022	2023	2024	Umum Kanwil Aceh
		3.6.8.7	Implementasi Aplikasi SINTA	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.6.9 Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC		2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.6.10 Penguatan Implementasi Budaya Pegawai DJBC (Tahap Lanjutan)							
		3.6.10.1	Pembentukan Tim Pengelola Penguatan Budaya	-	2021	-	-	-	SBG Banda
		3.6.10.2	Penyusunan Panduan dan Implementasi Program Penguatan Budaya	-	2021	-	-	-	SBG Banda
		3.6.10.3	Internalisasi dan Implementasi Lanjutan	-	-	2022	-	-	SBG Banda
		3.6.10.4	Monitoring dan Evaluasi Tahap Awal	-	2021	-	-	-	SBG Banda
		3.6.10.5	Internalisasi Program Penguatan Budaya Tahap Awal	-	2021	-	-	-	SBG Banda
		3.6.10.6	Monitoring dan Evaluasi Program Tahap Lanjutan	-	-	2022	-	-	SBG Banda
		3.6.11 Peningkatan kompetensi Pegawai Bea Cukai							
		3.6.11.1	Melaksanakan simulasi SOP	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.6.11.2	Melaksanakan uji kompetensi pelaksana	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.6.11.3	Melaksanakan <i>in-house training</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.6.11.4	Melaksanakan <i>Sharing knowledge</i> dengan KPPBC Lain	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.6.11.5	Melaksanakan <i>briefing</i> integritas pegawai	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
		3.6.12 Peningkatan kompetensi pegawai Bea Cukai di bidang TUSI dan Non Tusi							
		3.6.12.1	Pengusulan diklat	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.6.12.2	Pelaksanaan P2KP	2020	2021	2022	2023	2024	LSM
		3.6.13 Peningkatan kualitas SDM							
		3.6.13.1	Bintal	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.6.13.2	pengembangan kompetensi	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.6.13.3	Pelaksanaan CMC	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.6.13.4	Monitoring kesehatan fisik SDM	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.6.13.5	<i>Customs & Excise Client Service Charter (CECSC)</i>	2020	2021	2022	2023	2024	MBO
		3.6.14 Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala							
		3.6.14.1	Mengajukan Surat Kenaikan Gaji Berkala sesuai TMT KGB pegawai	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.6.14.2	Melaporkan kepada Urusan Keuangan mengenai KGB yang telah diajukan	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.6.15 Penyelesaian kenaikan pangkat							
		3.6.15.1	Memonitoring Proses Verifikasi Kenaikan pangkat yang telah diajukan	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
		3.6.15.2	Mengajukan berkas Kenaikan Pangkat untuk bulan April dan Oktober setiap tahun	2020	2021	2022	2023	2024	LGS
3.7	Penguatan citra DJBC melalui strategi komunikasi dan pemanfaatan medsos skala nasional dan internasional	3.7.1 Monitoring dan evaluasi Sabang Customs Clinic (Scunic)		2020	2021	2022	2023	2024	SBG
		3.7.2 Pembentukan Tim/Unit Sabang Customs Clinic (Scunic)		2020	-	-	-	-	SBG

Kode	Strategi	Kode	Program Kerja	Milestone					UIC		
				2020	2021	2022	2023	2024			
	nasional dan internasional	3.7.3	Pemberian apresiasi (<i>give away</i>) pada media sosial	2020	2021	2022	2023	2024	Banda LSM MBO		
		3.7.4	Pembuatan <i>content planning</i> publikasi media sosial	2020	2021	2022	2023	2024	Banda LSM SBG MBO LGS		
		3.7.5	Pembuatan laporan data analisis media sosial	2020	2021	2022	2023	2024	LSM		
		3.7.6	Pengusulan Peserta <i>workshop desain grafis</i> untuk media sosial	2020	2021	2022	2023	2024	MBO		
		3.7.7	Pengusulan Peserta <i>workshop social media management</i>	2020	2021	2022	2023	2024	MBO		
		3.7.8	Peningkatan <i>engagement</i> dengan masyarakat (peningkatan jumlah <i>followers</i>)	2020	2021	2022	2023	2024	Banda LSM SBG		
		3.7.9	Penyelenggaraan <i>workshop social media management</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Banda SBG		
		3.7.10	Pembuatan <i>content planning</i> publikasi media sosial	-	2021	2022	2023	2024	LGS		
		3.7.11	Peningkatan <i>engagement</i> dengan masyarakat (peningkatan jumlah <i>followers</i>)	-	2021	-	2023	-	LGS		
		3.8	Peningkatan kualitas komunikasi, publikasi dan bimbingan kepada pengguna jasa, serta kerja sama antar lembaga	3.8.1	<i>Communication Intelligence</i> atau melakukan proses pengumpulan data, analisis, monitoring, dan evaluasi sebagai dasar penyusunan strategi dan taktik komunikasi dan publikasi	-	2021	-	2023	-	LSM
				3.8.2	Penguatan fungsi saluran layanan informasi Bea Cukai Banda Aceh	2020	2021	2022	2023	2024	Banda
3.8.3	Peningkatan komunikasi kepada pengguna jasa melalui <i>group whatsapp</i>			2020	2021	2022	2023	2024	Banda		
3.8.4	Perubahan layout ruang layanan informasi			2020	-	-	-	-	SBG		
3.8.5	<i>Public Opinion Building</i> atau membentuk opini publik agar masyarakat mengetahui, mengenali, dan memahami tugas, fungsi, serta kinerja DJBC			2020	2021	2022	2023	2024	LSM Banda		
3.8.6	<i>Stakeholder Engagement</i> atau membangun interaksi dengan <i>stakeholder</i> untuk meningkatkan kualitas kinerja			2020	2021	2022	2023	2024	LSM Banda		
3.8.7	Publikasi pemanfaatan klinik ekspor KPPBC TMP C Kuala Langsa			-	2021	-	-	-	LGS		
3.9	Perencanaan strategis & manajemen risiko yang handal di bidang proses bisnis, kelembagaan, dan SDM	3.9.1	Pengelolaan risiko yang menitikberatkan pada budaya, SDM, dan Implementasi MR yang bersifat deskriptif, prediktif, dan preskriptif	2020	2021	2022	2023	2024	MBO		

BAB III KELEMBAGAAN

3.1. Kelembagaan

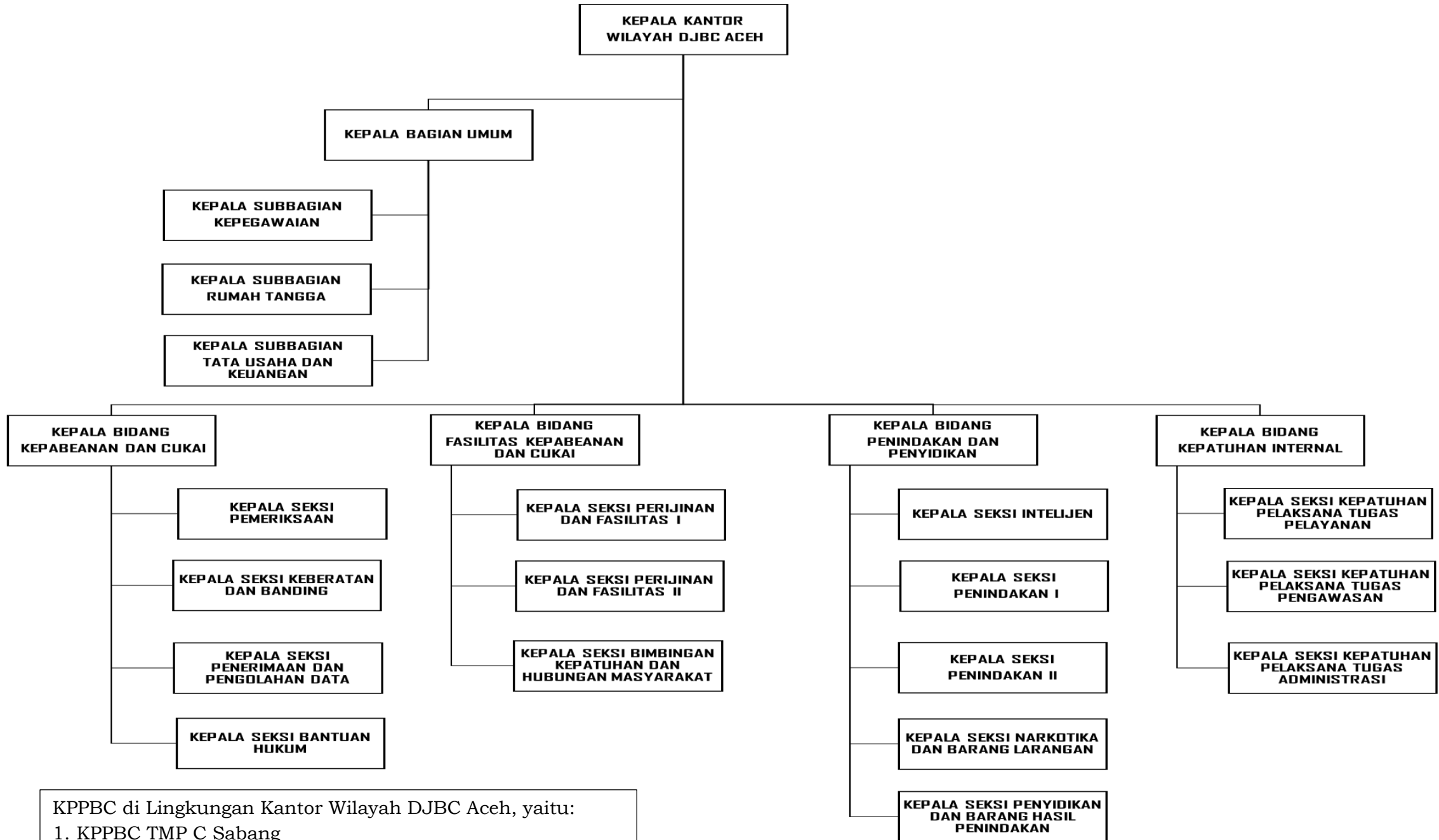
3.1.1 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh sebagai unsur pelaksana pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kantor Wilayah DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi antara lain pemberian bimbingan, pengendalian, pengawasan dan pengamanan teknis pelaksanaan tugas DJBC.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kantor Wilayah DJBC Aceh menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah Aceh;
- c. Pengendalian, evaluasi, perijinan dan pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Penelitian atas keberatan terhadap keputusan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pemberian bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian, dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- i. Perencanaan dan pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- k. Pengendalian, pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah DJBC Aceh;
- l. Pengoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- m. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah DJBC di Aceh.

3.1.2 Struktur Organisasi



KPPBC di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, yaitu:

1. KPPBC TMP C Sabang
2. KPPBC TMP C Banda Aceh
3. KPPBC TMP C Meulaboh
4. KPPBC TMP C Lhokseumawe
5. KPPBC TMP C Kuala Langsa

3.1.3 Arah Kebijakan Kelembagaan

Selaras dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam pidato pelantikan bahwa satu yang menjadi perhatian lima tahun kedepan adalah penyederhanaan birokrasi berupa pemangkasan eselonisasi dan peralihan jabatan struktural ke fungsional. DJBC dalam memproyeksikan arah kebijakan kelembagaan lima tahun kedepan tentunya menyelaraskan dengan arahan presiden dimaksud. DJBC merupakan institusi yang pada dasarnya memiliki fungsi utama terkait Pendapatan negara dan pengawasan terhadap pendapatan negara serta berperan vital dalam meningkatkan rasio pajak dan menjadi penggerak roda perekonomian nasional. Kedua fungsi tersebut merupakan *core business* DJBC rangka berpartisipasi aktif menyokong Kementerian Keuangan untuk menjalankan fokus strategi vitalnya dalam mengoptimalkan fungsi pendapatan Negara. Urgensitas dari kedua fungsi ini didasari amanat dari Undang-undang Kepabeanan dan Undang-undang Cukai.

Selanjutnya, untuk mendukung perubahan lingkungan yang kian berkembang, dalam struktur organisasi DJBC juga diperlukan unit khusus dan bersifat *modern* yang mengakomodir aspek transformasi kelembagaan, transformasi digital, dan perkembangan lingkungan strategis. Unit tersebut nantinya akan didukung dengan analisis-analisis yang secara khusus bertugas melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis baik yang bersumber dari luar maupun internal organisasi. Upaya-upaya di atas diperlukan mengingat peran DJBC yang semakin meningkat baik dari sisi cakupan maupun skalanya selama 5 (lima) tahun ke depan. Dalam hal ini, perencanaan strategis yang handal merupakan kunci keberhasilan yang dibutuhkan DJBC dalam menjalankan peran dan amanat yang diemban. Oleh Karena itu, DJBC juga akan melakukan eskalasi fungsi tenaga pengkaji dengan unit terkait. Hal tersebut ditujukan juga untuk lebih mengoptimalkan dan memfokuskan fungsi analisis kebijakan pada beberapa bidang, yaitu terkait dengan peran kepabeanan, cukai, pengawasan kepabeanan dan cukai, serta dukungan organisasi dan kelembagaan. Kantor Wilayah DJBC Aceh sebagai salah satu unit vertikal akan selalu mendukung kebijakan dari baik dari aspek transformasi kelembagaan, transformasi digital, dan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini diselaraskan dengan tujuan dan strategi yang sudah ditetapkan oleh DJBC.

Terkait dengan tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien, beberapa kegiatan dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Aceh yaitu terkait strategi pengembangan organisasi yang modern, dinamis, dan lincah serta debirokratisasi/*delaying* kelembagaan organisasi DJBC dengan melakukan:

- 1) Penerapan *Flexible Working Space* (FWS) merupakan pengaturan pola kerja pegawai yang memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode tertentu.

Namun dalam implementasi lebih lanjut diperlukan adaptasi, kreatifitas, dan sikap optimis dari seluruh pegawai.

Intinya hampir semua pekerjaan dapat dilakukan dari rumah, atau dimanapun ruang/tempat yang memiliki sarana/prasarana yang cukup dan dirasakan nyaman untuk melakukan pekerjaan. Inilah yang dinamakan ruang kerja fleksibel/FWS. Beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam rangka mendukung FWS antara lain:

1. Infrastruktur (sarana dan prasana)

Kantor Wilayah DJBC Aceh berupaya menyiapkan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan FWS dan mengontrol agar administrasidi Kantor Wilayah DJBC Aceh dapat berjalan secara baik, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan:

- a. CEHRIS G2 (*Customs and Excise Human Resources Information System*) untuk presensi *online* dan Aplikasi Nadine (Naskah Dinas Elektronik) untuk persuratan dan *MyTask*;
- b. Sarana *activity based workplace* dengan konsep *open space*.

2. Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh sebanyak 270 orang pegawai. Dari jumlah tersebut, terdapat generasi milenial (gen Y dan Z) yang berjumlah lebih dari setengah dari jumlah seluruh pegawai. Secara teoretis, generasi ini dikenal sebagai generasi yang *digital natives*, pengguna teknologi yang lebih tinggi, dan *team-oriented*. Hal ini menjadikan SDM Kantor Wilayah DJBC Aceh potensial untuk berhasil dalam pelaksanaan FWS.

Hal-hal yang terus perlu dilakukan untuk mempersiapkan diri menuju era *New Normal* adalah:

- a. Melakukan pemetaan jenis-jenis pekerjaan yang bisa dilakukan secara *remote* dan pekerjaan yang harus dilaksanakan di kantor.
- b. Membenahi tata kelola (penyesuaian proses FWS, kalibrasi Analisis Beban Kerja, pengukuran kinerja pegawai dan/atau target kinerja).

2) Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta peningkatan pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai *role model* Reformasi Birokrasi penegakan integritas dan pelayanan berkualitas sehingga menjadi aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di pemerintahan. Pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh mengikuti kontestasi ZI-WBK yaitu KPPBC TMP C Sabang dan KPPBC TMP C Banda Aceh, dan KPPBC TMP C Sabang berhasil mendapatkan peredikat Kantor Wilayah Bebas dari Korupsi.

Saat ini semua unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh, berkomitmen untuk mengimplementasikan unsur-unsur yang

ada pada ZI menuju WBK/WBBM di unit masing-masing. Dengan dukungan segenap pimpinan di Kantor Wilayah DJBC Aceh, Unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh senantiasa berpartisipasi untuk mengikuti penilaian WBK/WBBM yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mulai tahun 2013 hingga saat ini. Predikat WBK yang diraih oleh unit kerja di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh bukan hanya sebagai simbolis semata, namun sudah menjadi salah satu dari *living our values* dan juga pembuktian kepada publik dan pihak eksternal bahwa Kantor Wilayah DJBC Aceh dan unit kerja di Lingkungannya layak mendapatkan predikat WBK/WBBM.

3) Implementasi jabatan fungsional

Sesuai dengan arahan presiden, penyederhanaan birokrasi dilaksanakan dengan melakukan pemangkasan eselonisasi, peralihan jabatan struktural ke fungsional. Hal tersebut dilakukan bertujuan pada percepatan pembangunan dan investasi lapangan kerja.

Dalam periode lima tahun kedepan, DJBC akan melakukan pengalihan jabatan struktural ke fungsional secara bertahap. Pengalihan jabatan dilakukan secara selektif dan terukur untuk menjaga kualitas kinerja yang selama ini telah terbangun. Perjalanan Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai telah dimulai sejak tahun 1989 dengan terbitnya KepmenPAN Nomor 21 Tahun 1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai. Sejak KepmenPAN JFPBC pertama tersebut, peraturan JFPBC mengalami beberapa Kali perubahan, terakhir dengan PermenPAN-RB Nomor 31 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai. Selanjutnya, penyempurnaan kebijakan di bidang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan yang akan dilakukan pada kurun 2020 sampai dengan 2024 adalah dengan besaran sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut arahan Presiden terkait penyederhanaan birokrasi dan penguatan jabatan fungsional kementerian dan lembaga;
- b. Penyesuaian konsep JFPBC dengan konsep dasar jabatan fungsional sebagaimana diatur PermenPAN-RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pengayaan butir kegiatan sebagai tindak lanjut proses transformasi jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional;
- d. Perbaikan pola karir JFPBC

Implementasi JFPBC yang akan dilakukan pada tahun 2020 dapat dibagi menjadi (2) bagian sebagai berikut:

a. Implementasi JFPBC hasil *delayering* Organisasi

Dalam proses implementasi JFPBC hasil *delayering* dibutuhkan analisis dan pemetaan pada jabatan-jabatan yang dapat dialihkan menjadi JFPBC. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Hasil

pemetaan jabatan-jabatan yang dapat dialihkan ke dalam jabatan fungsional tersebut selanjutnya akan diangkat ke dalam jabatan fungsional dengan memperhatikan kesesuaian tugas dan fungsi yang dimiliki. Dalam proses implementasi JFPBC hasil delayering, hanya terdapat 3 jenjang jabatan dalam jabatan fungsional, yaitu:

- 1) Ahli Pertama untuk transformasi Eselon V
- 2) Ahli Muda untuk transformasi Eselon IV
- 3) Ahli Madya untuk transformasi Eselon III

Saat ini di Kantor Wilayah DJBC Aceh sudah diimplementasikan untuk Jabatan Fungsional Bea Cukai jenjang Ahli Pertama.

- b. Implementasi JFPBC secara normatif dan prosedural
Implementasi JFPBC selanjutnya pada Tahun 2020 dilakukan dengan pemetaan kebutuhan formasi pada masing-masing unit di lingkungan DJBC yang nantinya akan dilakukan pengusulan penetapan formasi. Atas dasar formasi tersedia akan dilakukan usulan pengangkatan dengan pertimbangan tingkat kebutuhan dan tingkat kepentingan pada masing-masing unit di lingkungan DJBC. Dalam proses implementasi JFPBC normatif ini, seluruh jenjang dari Pemula sampai dengan Utama dimungkinkan dapat diimplementasikan.

Setelah proses implementasi, selanjutnya akan dilakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, penyempurnaan pola karir SDM terkait jabatan fungsional pemeriksa bea dan cukai, implementasi jabatan fungsional lainnya lingkungan DJBC, dan pembinaan jabatan fungsional.

3.2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Kebijakan utama Pengembangan Sumber Daya Aparatur secara menyeluruh diarahkan untuk memastikan tersedianya SDM yang berintegritas dan berkompentensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran DJBC. Sasaran utama kebijakan ini adalah menciptakan proses rekrutmen yang transparan dan mampu menarik talenta terbaik, meningkatkan kompetensi pegawai, dan menciptakan keterkaitan yang jelas antara kinerja, *rewards*, dan *recognition*.

Seiring dengan berkembangnya peran Kantor Wilayah DJBC Aceh, tuntutan terhadap profesionalisme dan kinerja SDM juga harus ditingkatkan. Selain itu, kualitas dan kuantitas SDM menjadi sangat penting dalam rangka mendukung tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Aceh untuk menghadapi tantangan ke depan.

3.2.1. Kondisi SDM Kantor Wilayah DJBC Aceh Saat Ini

Berdasarkan data kondisi SDM Kantor Wilayah DJBC Aceh, termutakhir sesuai daftar ABK per tanggal 1 Januari 2020, dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Aceh didukung oleh 270 orang pegawai belum termasuk CPNS rekrutmen 2019/2020 sebanyak yang tersebar di seluruh KPPBC dilingkungan Kantor Wilayah DJBC

Aceh. Sedangkan Proyeksi kebutuhan SDM 2020-2024 seiring dengan berkembangnya peran Kantor Wilayah DJBC Aceh, tuntutan terhadap kinerja dan profesionalisme SDM DJBC juga terus meningkat. Kuantitas dan kualitas SDM juga menjadi tolak ukur yang penting dalam menjawab tantangan peran dan tanggung jawab DJBC tersebut. Di lain pihak, SDM yang ada sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan yang ideal agar fungsi dan peran organisasi tersebut dapat berjalan optimal, baik dari segi kuantitas (jumlah) maupun kualitas (kompetensi). Saat ini Kantor Wilayah DJBC Aceh selalu mendapatkan SDM yang banyak berasal dari lulusan PKN STAN yang baru lulus, sehingga secara kuantitas cukup untuk saat ini, namun sampai dengan 2024 Kantor Wilayah DJBC Aceh DJBC masih membutuhkan penambahan pegawai kurang lebih sebanyak 300 Orang. Sedangkan dari sisi kualitas kebutuhan SDM di Kantor Wilayah DJBC Aceh dan KPPBC di lingkungan DJBC Aceh kondisi saat ini masih banyak yang belum sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan SDM dengan kualitas seperti nahkoda, Kepala Kamar Mesin (KKM), jurusita, penyidik dan Analis senior sangat diperlukan dalam rangka menunjang kinerja.

3.3. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka menunjang pelayanan dan pengawasan yang optimal serta dapat mendukung kinerja dalam menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat dan menghadapi tantangan ke depan, Kantor Wilayah DJBC Aceh perlu melakukan pengadaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi Kepabeamanan (TIK):

- 1) Pengadaan tanah, bangunan gedung kantor, rumah dinas pejabat dan/pegawai dan Sarana pengawasan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Aceh melalui mekanisme usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara dengan tetap memperhatikan optimalisasi aset.
- 2) Renovasi bangunan dalam rangka menyiapkan sarana yang dapat mendukung pelaksanaan FWS.
- 3) Penyiapan kapal yang akan digunakan sebagai Pos Apung Bantu, serta lokasi dan perizinan pembangunan Pos Apung Bantu.
- 4) *Monitoring Control Room* dengan perangkat IT/komunikasi yang mendukung kelancaran sistem integrasi antara Kantor Wilayah dan satuan kerja di wilayah, misal: server, monitor, jaringan internet/*bandwidth* yang tinggi.
- 5) Alat *surveillance* yang dapat menjadi *feeder* dalam sistem informasi pengawasan laut, baik di wilayah maupun terpusat di Puskodal, misal: *Coastal Surveillance System (CSS)*, radar, *long ranged camera*, sistem pencitraan satelit.
- 6) Peralatan dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan
- 7) Kendaraan operasional baik roda dua maupun roda empat.
- 8) Pengadaan Komputer, Laptop, Drone, Printer, Scanner dan peralatan lainnya untuk mendukung kinerja pegawai dalam menjalankan FWS/ABW dalam era *new normal* dan dalam rangka kehumasan.
- 9) Peralatan penunjang dalam rangka protokol Covid-19.

BAB IV

TARGET KINERJA

Sebagaimana dijelaskan pada Bab III, bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Aceh telah menetapkan 3 (tiga) tujuan Organisasi meliputi 1) *Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif*, 2) *Penerimaan negara yang optimal*, 3) *Birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien*, yang telah dijabarkan dalam sasaran strategis masing-masing. Dan untuk mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis, maka ditetapkanlah indikator dan target kinerja dengan rincian sebagai berikut:

Target Kinerja Kantor Wilayah DJBC Aceh
Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perlindungan masyarakat dan dukungan perekonomian yang efektif dan kontributif	Persentase efektivitas kegiatan patroli dan operasi kepabeanan dan cukai	70%	71%	72%	73%	74%
	Persentase efektivitas patroli laut	71%	72%	73%	74%	75%
Penerimaan negara yang optimal	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	100%	100%	100%	100%
	Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum kepabeanan dan cukai	74,5%	75,33%	76,33%	77,33%	78,33%
Birokarsi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,30	4,32	4,34	4,36	4,38
	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	80%	81%	82%	83%	84%
	Persentase tindak lanjut rekomendasi aparat pengawas fungsional	80%	81%	82%	83%	84%
	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	95,1%	95,2%	95,3%	95,4%

BAB V

PENUTUP

Dokumen Perencanaan Strategis Kantor Wilayah DJBC Aceh merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Keuangan, serta DJBC ke dalam tujuan dan sasaran strategis DJBC dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan tujuan DJBC. Dokumen ini menjadi pedoman bagi DJBC dalam mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” dan Visi Kementerian Keuangan yaitu “Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, serta mendukung Visi DJBC yaitu “Menjadi Institusi Kepabeanan dan Cukai Terkemuka di Dunia dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: “Kementerian Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan Peta Strategi dan Rencana Kerja Tahunan Kantor Wilayah DJCB Aceh.